



# Laporan Sosial Ekonomi Budaya Ekspedisi Mangrove Papua Barat

Kaimana | Fakfak | Bintuni | Sorong Selatan | Raja Ampat  
02-16 Desember 2019



# Laporan Sosial Ekonomi Budaya Ekspedisi Mangrove Papua Barat

Kaimana | Fakfak | Bintuni | Sorong Selatan | Raja Ampat  
01-16 Desember 2019

Disusun oleh:

Dean Affandi<sup>1</sup>, Rizky Haryanto<sup>1</sup>, Willy Daeli<sup>1</sup>, Bonifasius Maturbongs<sup>1</sup>, Julia Kalmirah<sup>1</sup>,  
Aloysius Numbery<sup>2</sup>, Nina Nuraisyah<sup>2</sup>, Sumardi Ariansyah<sup>2</sup>, Wiro Wirandi<sup>2</sup>

- 1 World Resources Institute Indonesia
- 2 Yayasan EcoNusa

# DAFTAR ISI

Pengantar	1
Lokasi Penelitian	1
Metode	2
Alur Laporan	2
Karakteristik Umum	3
Karakteristik Umum Sistem Sosial-Budaya	3
Karakteristik Umum Pemanfaatan dan Pengelolaan Ekosistem Bakau	3
Karakteristik Umum Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Non-Bakau	4
Karakteristik Umum Pemanfaatan dan Pengelolaan Perikanan	6
Kampung Kambala	9
Karakter Etnologis	9
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Bakau dan Non-Bakau	11
Bakau	11
Non-Bakau	11
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Perikanan	13
Kampung Air Besar	14
Karakter Etnologis	14
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Bakau dan Non-Bakau	14
Bakau	14
Non-Bakau	16
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Perikanan	18
Kampung Pahger Nkendik	19
Karakter Etnologis	19
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Bakau dan Non-Bakau	19
Bakau	19
Non-Bakau	20
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Perikanan	23
Kampung Mandoni	24
Karakter Etnologis	24

# DAFTAR ISI

Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Bakau dan Non-Bakau	25
Bakau	25
Non-Bakau	27
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Perikanan	28
Kampung Modan	29
Karakter Etnologis	29
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Bakau dan Non-Bakau	29
Bakau	29
Non-Bakau	32
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Perikanan	35
Kampung Sidomakmur	36
Karakter Etnologis	36
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Bakau	36
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Perikanan/Non-Bakau	37
Kampung Mugim-Nusa	42
Karakter Etnologis	42
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Bakau dan Non-Bakau	43
Bakau	43
Non-Bakau	45
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Perikanan	46
Kampung WaiLebet	49
Karakter Etnologis	49
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Bakau dan Non-Bakau	50
Bakau	50
Non-Bakau	51
Karakter Pemanfaatan & Pengelolaan Perikanan	52
Lampiran	55
Pedoman Wawancara	55



## Pengantar

### LOKASI PENELITIAN

Laporan sosial-ekonomi-budaya ini merupakan hasil temuan lapangan dari kegiatan penelitian yang merupakan bagian dari ‘Ekspedisi Mangrove 2019’. Ekspedisi ini dilakukan selama kurang lebih 14 hari pada bulan November 2019 di 9 kampung di 5 kabupaten di pesisir selatan wilayah kepala burung Papua Barat (lihat Gambar 1). Ke-sembilan kampung yang menjadi lokasi penelitian adalah:

- Kampung Kambala di Kabupaten Kaimana
- Kampung Air Besar, Kampung Pahger Nkendik, dan Kampung Mandoni di Kabupaten Fakfak
- Kampung Modan dan Kampung Sidomakmur di Kabupaten Teluk Bintuni
- Kampung Mugim and Kampung Nusa di Kabupaten Sorong Selatan
- Kampung Weilebet di Kabupaten Raja Ampat.



Gambar 1. Rute Perjalanan Ekspedisi Mangrove dan Lokasi Kampung

**METODE**

Data diperoleh melalui diskusi kelompok dan wawancara semi-terstruktur terhadap informan-informan kunci dengan ± total keseluruhan 85 orang. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam aktivitas wawancara dan diskusi kelompok dilakukan untuk memahami sistem sosial-budaya serta pengetahuan lokal tentang praktek pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem bakau dan sumber daya alam di masing-masing kampung (lihat lampiran).

**ALUR LAPORAN**

Berdasarkan hasil analisis awal terhadap penjelasan-penjelasan dari informan-informan kunci, laporan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah penjelasan tentang gambaran umum mengenai karakteristik lokasi-lokasi penelitian berdasarkan aspek sosial budaya, pemanfaatan dan pengelolaan bakau/non-bakau, dan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan. Bagian kedua adalah pembahasan lebih mendalam untuk setiap kampung yang menjadi lokasi studi, yang terdiri dari tiga sub-bagian. Bagian pertama memaparkan karakteristik sistem social-budaya (etnologis) di lokasi penelitian, bagian kedua menjelaskan sistem pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem bakau dan non-bakau, dan bagian ketiga menjelaskan sistem pemanfaatan dan pengelolaan perikanan.

## Karakteristik Umum

### KARAKTERISTIK UMUM SISTEM SOSIAL-BUDAYA

Bagi masyarakat pesisir di 9 kampung di wilayah selatan Papua Barat, nilai-nilai adat menjadi pedoman dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Kampung-kampung yang kami kunjungi memiliki derajat yang berbeda-beda terkait pengaplikasian nilai-nilai ini. Berdasarkan temuan kami di mayoritas desa yang kami kunjungi, implementasi nilai-nilai adat dapat terlihat dari pembagian wilayah-wilayah petuanan berdasarkan marga atau suku yang secara variatif ditemukan di 8 kampung yang populasinya masih didominasi oleh orang asli Papua. Wilayah-wilayah petuanan ini merepresentasikan sistem kepemilikan dan sistem pengelolaan sumber daya alam di area *terrestrial*, pesisir, dan laut. Selain wilayah adat, masyarakat di berbagai kampung tersebut juga masih mempraktekkan nilai-nilai tradisional dalam wujud ritual-ritual adat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Adapun, karakter yang berbeda ditemukan di Kampung Sidomakmur yang merupakan kampung transmigran. Kampung ini didominasi oleh transmigran dari Pulau Jawa dan sebagian kecil populasi berasal dari berbagai daerah lain di sekitar Papua sehingga nilai-nilai adat Jawa yang seringkali dipraktekkan. Namun, pada dasarnya setiap kampung memiliki pengetahuan lokal tersendiri dalam mengelola sumber daya bakau dan non-bakau yang saling berinteraksi dengan kebutuhan ekonomi dan subsistensi.

### KARAKTERISTIK UMUM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM BAKAU

Berdasarkan temuan kami, sumber daya alam yang biasa ditemukan pada ekosistem bakau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan subsistensi dan kebutuhan ekonomi. Dari segi pemenuhan kebutuhan subsistensi, ekosistem bakau dimanfaatkan dalam skala kecil untuk konsumsi rumah tangga. Sumber daya alam ekosistem bakau yang secara subsisten dimanfaatkan, contohnya ulat bakau (*tambelo* dalam bahasa lokal), kayu bakar dari pohon-pohon bakau yang tumbang, dan untuk keperluan pembangunan rumah atau fasilitas desa. Sementara, dari segi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sumber daya alam dari ekosistem bakau

dimanfaatkan untuk dijual ke pasar atau pengumpul yang datang dari kota-kota terdekat. Sumber daya alam dari ekosistem bakau yang biasa dijual adalah kepiting bakau (*karaka*), kerang (*bia*), udang, dan berbagai jenis ikan.

Terdapat variasi intensitas pemanfaatan sumber daya alam dari ekosistem bakau yang menunjukkan perbedaan karakteristik masing-masing kampung. Masyarakat kampung Mandoni, Modan, Sidomakmur, Mugim, Nusa, dan Wai Lebet yang secara lebih dominan memanfaatkan komoditas unggulan dari bakau yang memiliki nilai jual untuk kebutuhan ekonomi dibandingkan kebutuhan subsistensi. Sementara, masyarakat kampung Kambala, Air Besar, dan Pahger Nkendik secara lebih dominan memanfaatkan ekosistem bakau sebagai pemenuh kebutuhan subsistensi.

Bagi masyarakat yang secara dominan memanfaatkan sumber daya ekosistem bakau untuk kebutuhan ekonomi, mereka secara aktif turut mengelola ekosistem bakau di sekeliling kampung mereka, contohnya masyarakat Kampung Mandoni yang secara mandiri melakukan penanaman bakau. Selain itu, masyarakat memberlakukan peraturan lokal yang bersifat informal untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya ekosistem bakau, contohnya di Kampung Madoni, Modan, Mugim, Nusa, dan Wai Lebet yang tidak menjual kepiting betina atau kepiting yang berukuran kecil, masyarakat Kampung Sidomakmur tidak menangkap atau menjual udang yang berukuran kecil. Sementara, bagi masyarakat yang secara dominan hanya memanfaatkan ekosistem bakau untuk kebutuhan subsistensi hanya bergantung pada siklus alami regenerasi ekosistem bakau.

#### **KARAKTERISTIK UMUM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM NON-BAKAU**

Masyarakat pesisir yang kami jumpai selama ekspedisi mengandalkan penghasilan dari bahan-bahan mentah yang kemudian dijual pada *tokek* atau pengumpul. Pada umumnya mata pencaharian ini adalah praktek berkebun yang telah diwariskan secara turun temurun dari jaman nenek moyang mereka. Apabila dibandingkan dengan hasil dari laut, maka hasil dari kebun memberikan penghasilan yang lebih pasti dan konsisten. Hal ini banyak disebabkan karena



masyarakat membutuhkan modal yang lebih besar untuk melaut, seperti ketersediaan pendingin dan bensin untuk kapal. Berikut ini adalah penjelasan singkat terkait beberapa komoditas yang dikelola oleh masyarakat pesisir di daerah Kepala burung, Papua Barat.

### *Kebun Pala*

Pemanfaatan dan pengelolaan kebun pala secara dominan ditemukan di Kampung Air Besar, Pahger Nkendik, Mandoni, dan Modan. Masyarakat di 4 kampung ini memanfaatkan hasil kebun pala (*dusun* dalam bahasa lokal) yang diwariskan secara turun-temurun untuk dijual ke pengumpul. Masing-masing marga di setiap kampung memiliki area kebun pala yang secara umum hanya boleh diwariskan dan dipanen oleh anggota marga tersebut. Pembukaan lahan baru atau sistem pinjam antar anggota marga juga lazim dilakukan, misalnya, ketika terjadi penambahan anggota keluarga atau migrasi penduduk dari luar kampung. Adapun mekanisme sistem pinjam dan pembukaan lahan baru biasa terjadi selama memperoleh ijin dari petuanan atau ketua marga yang bersangkutan.

Panen pala biasa dilakukan dua kali setahun. Sebelum panen, mereka biasa memberlakukan *sasi* pala, biasanya 3 bulan sebelum waktu panen, untuk menjaga kualitas panen. Selama masa *sasi* pala, masyarakat dilarang masuk ke area *sasi* dan sanksi adat diberlakukan bagi mereka yang melanggar. Pemberlakuan *sasi* ditentukan oleh petuanan melalui ritual-ritual adat. Dipimpin oleh petuanan, masyarakat biasa mempersembahkan sesajen berupa kopi lokal, tembakau lokal, dan sirih pinang dalam suatu wadah untuk kemudian diletakkan di pohon-pohon pala tertentu sebagai tanda berakhirnya masa panen.

### *Kebun Coklat, Sayur, Buah*

Selain pala, terdapat berbagai hasil pertanian dan perkebunan lain yang dimanfaatkan masyarakat. Contohnya adalah tanaman kakao dan pisang yang menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat Kampung Wailebet. Sumber pendapatan alternatif tersebut dibutuhkan oleh masyarakat khususnya ketika menghadapi ancaman ketidakstabilan harga serta

tantangan semakin sulitnya memperoleh hasil tangkapan ikan dan udang. Hal tersebut antara lain dipengaruhi masih minimnya upaya budidaya hewan bakau yang menjadi andalan ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya upaya konservasi seperti sasi.

Selain itu, sayur dan buah juga mulai dibudidayakan oleh masyarakat Kampung Modan; antara lain semangka dan kangkung. Seperti halnya kampung Wailebet, hal tersebut dilakukan masyarakat Kampung Modan untuk menunjang diversifikasi ekonomi masyarakat, selain dari mengandalkan hasil tangkapan udang dan kepiting bakau. Untuk memulai dan mengembangkan budidaya sayur dan buah tersebut, masyarakat kampung Modan berkolaborasi dengan perusahaan migas yang beroperasi di Teluk Bintuni.

#### **KARAKTERISTIK UMUM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN**

Masyarakat pesisir Papua Barat memanfaatkan sumberdaya ikan dari ekosistem mangrove dengan cara menangkapnya dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan alat penangkapan ikan (API). Secara umum, masyarakat Papua Barat yang tinggal di daerah pesisir melakukan kegiatan penangkapan ikan termasuk di daerah ekosistem mangrove. Akan tetapi tidak semua masyarakat pesisir menjadikan menangkap ikan sebagai mata pencaharian utama, sehingga mereka masuk kedalam kategori nelayan paruh waktu.

Untuk mencapai daerah penangkapan ikan (DPI) mereka berjalan kaki maupun menggunakan perahu. Waktu untuk menangkap ikan dapat dilakukan pada malam hari maupun disaat terang. Ikan yang ditangkap dikonsumsi oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga dan dijual kepada warga kampung serta supplier ikan.

Secara umum mereka mengetahui tentang aturan dalam mengelola sumberdaya laut, yaitu Sasi laut. Sasi laut yaitu suatu aturan hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat adat untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya ikan dan juga untuk melindungi daerah-daerah yang dilindungi oleh adat. Akan tetapi tidak semua daerah menerapkan hukum Sasi laut dan Sasi sendiri biasanya dipakai untuk pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di darat.

### *Jenis ikan utama*

Ikan yang sering ditangkap ialah kepiting bakau, kerang darah, dan ikan kakap merah. Jenis ikan ini merupakan hasil tangkapan di kampung Air Besar, Kampung Pagher Nkendik, Mandoni, Modan dan Mugim. Sedangkan di Kampung Kambala dan Weilebet lebih kepada ikan kakap merah. Di beberapa kampung seperti kampung Mandoni, Modan dan Mugim, ikan yang ditangkap dijadikan ikan umpan untuk menangkap kepiting bakau. Jenis ikan umpan yang sering ditangkap ialah ikan Sembilang.

### *Perahu*

Sebagian besar masyarakat pesisir mempunyai kapal atau perahu baik digunakan untuk kendaraan maupun untuk menangkap ikan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, ukuran kapal yang dimiliki tidak lebih dari ukuran 5 gross ton dengan ukuran mesin tempel ialah 15 pk. Bentuk perahu ialah memanjang dengan ukuran kurang dari 10 meter dengan lebar tidak lebih dari 2 meter, terbuat dari kayu atau fiber.

### *Alat Tangkap*

Nelayan mempunyai pancing dan jaring untuk menangkap ikan. Akan tetapi untuk menangkap kepiting, mereka memakai alat tertentu yaitu perangkap atau dikenal dengan nama Bubu. Bentuk perangkap yang didapati ada tiga bentuk, yaitu perangkap kotak, perangkap lingkaran dan perangkap lingkaran menggunakan tiang tancap. Untuk menangkap kerang mereka terkadang hanya memakai tangan, tapi sebagai alat bantu mereka akan menangkap memakai serok yang terbuat dari bamboo.

### *Waktu dan musim penangkapan ikan*

Mereka menangkap ikan sepanjang tahun dan tidak ada bergantung kepada musim tertentu yang ditandai dengan angin timur dan angin barat. Adapun kegiatan penangkapan dapat lebih ramai apabila ada permintaan dan harga yang bagus untuk jenis tertentu seperti kepiting bakau. Apabila air pantai sedang surut mereka berjalan kaki mencari ikan yang terperangkap di pantai,

kegiatan ini disebut “Bameti” yang dilakukan sebelum malam. Apabila dilakukan pada malam hari disebut “Balobe”. Khusus untuk menangkap kepiting bakau, nelayan akan melakukan setting perangkap di pagi hari dan membiarkan perangkap terendam beberapa jam. Nelayan akan kembali ke rumahnya pada siang hari dan kemudian akan kembali ke DPI pada sore hari untuk mengangkat perangkapnya. Untuk menangkap ikan, mereka memancing setiap waktu baik pada terang dan gelam malam, dan hal ini akan tergantung dengan keadaan cuaca apabila memungkinkan untuk menaiki perahu.

#### *Paska panen dan penjualan*

Tidak ada kegiatan pengolahan dari ikan yang ditangkap oleh nelayan, mereka akan mengkonsumsi sendiri dan atau menjualnya kepada masyarakat kampung dan supplier. Dibeberapa kampung pengamatan kebanyakan nelayan mengkonsumsi sendiri hasil tangkapannya dan akan menjual. Sedangkan kampung yang sudah mempunyai supplier dan dekat dengan bandara menerima hasil tangkapan dari nelayan, seperti di distrik Babo dan distrik Batanta.

## Kampung Kambala

### KARAKTER ETNOLOGIS

Kampung Kambala bagian dari Distrik Buruway di Kabupaten Kaimana. Distrik ini terdiri dari 10 kampung meliputi 25 wilayah petuanan dengan luas wilayah 4.500 m<sup>2</sup> dan ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Kampung ini berjarak 275 km dari ibukota Provinsi Papua Barat. Sedangkan dari kota Kabupaten Kaimana berjarak 60 km. Kampung ini sebelah utara berbatasan dengan kampung Edor, sebelah selatan dengan kampung Nusaulam, sebelah timur dengan kampung Adi Jaya, dan sebelah barat dengan kampung Tairi. Awalnya lokasi pemukiman Kampung Kambala berada di tanjung di ujung desa dan masih bernama Kampung Gabaerah. Dengan semakin meningkatnya tingkat populasi warga, kondisi tanah di lokasi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendirikan banyak bangunan, sehingga sebelum dekade 60'an mereka memutuskan untuk membuka kampung baru di lokasi saat ini dengan nama Kambala yang bermakna Ka'abah.

Ketika kampung ini masih bernama Gabaerah, saat itu hanya terdapat dua marga, yaitu Yagana dan Etana yang bisa dikatakan merupakan marga asli kampung ini. Namun saat ini, terdapat 3 marga besar di Kampung Kambala, yaitu Yagana, Etana, dan Sardiki. Ketiga marga ini dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Kampung Kambala. Masing-masing marga memiliki wilayah kepemilikan lahan masing-masing (atau biasa disebut wilayah petuanan) yang sudah diatur sedemikian rupa. Pengetahuan tentang kepemilikan lahan ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Contohnya, wilayah marga Etana dimulai dari sungai sampai gunung di dekat tanjung. Sementara, kepemilikan lahan Yagana terdapat dari sebelah tanjung hingga ke Edor. Untuk marga Sardiki, wilayahnya terbentang dari Kampung Kambala sampai ke ujung tanjung. Setiap petuanan memiliki seorang yang dituakan. Segala urusan yang berkaitan dengan tata kepemilikan lahan (contohnya aktivitas perkebunan, pertanian, adat seperti sasi dll) harus diketahui dan diijinkan oleh orang yang dituakan dalam wilayah petuanan yang bersangkutan.

Selain ketiga marga besar tersebut, terdapat marga-marga lain, contohnya Isoga, Naroba, Uriepa, dan Samai. Marga-marga tersebut bisa dikatakan hadir setelah adanya 3 marga besar (atau bisa dikatakan pendatang). Marga-marga pendatang tersebut secara harmonis hidup berdampingan dengan marga-marga besar lainnya. Perkawinan eksogami (perkawinan campur) antara marga pendatang dan marga besar sudah terjadi secara turun-temurun, seperti yang dikatakan seorang informan: "Iya mereka [marga pendatang] juga punya hak tinggal sampe saat ini udah kawin baku kawin ya sudah hidup sama-sama seperti macam saya sendiri umpamanya. Mama saya kan petuanan [Etana]. Tapi saya kan marganya beda ikuti bapak, Naroba. Tetapi saya juga punya hak makan ada di Etana karena sebagian saya dari Etana juga."

Selain marga-marga di atas, ada juga pendatang dari luar Papua, contohnya dari Jawa, Maluku, dan Sulawesi (Bugis & Manado), sehingga bisa dikatakan sudah cukup plural secara komposisi masyarakat. Menurut data statistik kampung (2019), kampung Kambala terdiri dari 148 KK (600 orang: 307 laki-laki dan 293 perempuan). Jumlah penduduk usia produktif (15-55 tahun) berjumlah 442 orang meliputi masih sekolah 213 orang, bekerja penuh 45 orang, bekerja tidak tetap 33 orang, tidak sekolah dan tidak bekerja 18 orang, ibu rumah tangga 132 orang. Dari 600 orang yang tercatat menurut tingkat pendidikan, ada 59 orang warga kampung Kambala lulusan sarjana (S1), 25 orang lulusan D3, dan 1 orang lulusan D1. Lulusan SLTA ada 87 orang, lulusan SLTP ada 60 orang dan lulusan SD 732 orang. Mayoritas warga tidak tamat SD sebanyak 236 orang dan 38 orang tidak pernah bersekolah. Angka buta huruf di kampung ini cukup rendah yaitu 13 orang. Mayoritas warga kampung Hambalang beragama Islam. Dari 600 orang pemeluk agama yang tercatat di kampung terdapat 503 orang beragama Islam, 77 orang beragama Kristen Protestan, dan 20 orang beragama Katolik.



## **KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN BAKAU DAN NON-BAKAU**

### **Bakau**

Di ekosistem bakau, masyarakat memanfaatkan berbagai komoditas yang tersedia. Diantaranya adalah: kepiting, udang, ikan, siput, tambelo (ulat bakau), teripang, siput Mutiara. Selain dari komoditas hewan mangrove tersebut, masyarakat secara umum tidak memanfaatkan kayu mangrove untuk kebutuhan sehari-hari. Pencurian kayu mangrove yang melewati batas kepemilikan berdasar petuanan sendiri dapat dikenai denda sesuai yang berlaku di petuanan masing-masing. Selain itu, sejauh ini menurut masyarakat belum ada perusahaan maupun pihak dari luar desa yang datang mengambil kayu bakau di Kambala. Seiring dengan itu, persepsi masyarakat saat ini melihat bahwa hutan mangrove memiliki kelestarian yang terjaga dari waktu ke waktu. Masyarakat juga tidak melihat adanya tantangan tersendiri sampai saat ini dalam menjaga kelestarian mangrove, karena untuk pengambilan kayu sehari-hari lebih banyak bergantung pada hutan alam di kampung. Adanya peran organisasi lingkungan seperti Conservation International (CI) yang beberapa kali datang ke desa juga dilihat masyarakat memiliki peran dalam menjaga mangrove di Kambala: "Biasanya kita pergi memancing, dulunya kita kan bisa lewat disitu tapi kan sekarang tidak bisa. Karena semuanya pohon bakau disitu. Akhirnya kita putar, putar ke tempat yang kosong..."

### **Non-Bakau**

Terkait komoditas non-mangrove yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Kambala, mayoritas masyarakat adalah nelayan ikan laut. Ikan laut tersebut tidak untuk dijual ke luar desa, melainkan untuk dimakan sehari-hari. Sebagai moda mencari ikan laut, masyarakat mengandalkan perahu johnson untuk kemudian mencari ikan dengan alat tangkap jaring, atau menyelam bermodal kompresor. Saat ini, masyarakat lebih banyak mengandalkan kompresor, karena dirasa semakin sulit menangkap ikan besar bermodal jaring nilon tersebut. Mengingat perannya yang sentral dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari masyarakat, sejauh ini tidak ada kebijakan sasi yang diterapkan masyarakat setempat untuk ikan laut.

Untuk kebutuhan sehari-hari semisal pembuatan pondok/rumah atau dijual, masyarakat lebih banyak melakukan pengambilan kayu secara terbatas di hutan alam, yang lokasinya terletak di belakang kampung. Masyarakat menggunakan alat yang disebut “sencok” untuk mengambil kayu tersebut. Kayu yang diambil biasanya berupa kayu gaharu, kayu merbau, dan kayu putih. 1 kg gaharu bisa dijual hingga 1 juta rupiah; 1 kg merbau bisa dijual hingga 2 juta rupiah; dan 1 kg kayu putih bisa dijual hingga 800 ribu rupiah. Persepsi masyarakat yang digali menunjukkan bahwa terlepas dari kebutuhan pengambilan kayu masyarakat, kelestarian hutan alam masih terjaga dikarenakan pengambilan bersifat terbatas. Hal ini berbeda dengan kondisi sekitar tahun 2002 lalu, dimana ada beberapa perusahaan kayu yang masuk kawasan hutan dalam berbagai area petuanan di Kambala. Perusahaan tersebut menebang kayu dalam area Kambala untuk dijual. Lokasi dan izin operasional pengambilan kayu oleh perusahaan tersebut di kampung didasarkan pada batas wilayah petuanan adat, khususnya petuanan Etana, Sadiki dan Yagana. Penebangan kayu tersebut diikuti dengan penanaman kembali, dengan fasilitasi bibit dari dinas pertanian daerah. Perusahaan tersebut kemudian tutup sekitar tahun 2005.

Sebagian masyarakat juga memanfaatkan hasil kebun seperti pala dan kopra. Terkait pala, masyarakat biasa menjual biji dan bunga pala secara terpisah ke ibukota kabupaten Kaimana. Harga jual keduanya juga berbeda: biji pala per kg dihargai 30 ribu rupiah, sedangkan bunga pala per kg dihargai 120 ribu rupiah. Dalam setahun, pala dipanen dua kali sesuai musim: musim timur dan musim barat. Sedangkan untuk kopra, harga jualnya yang rendah (rata-rata 2000 rupiah) membuat masyarakat tidak mengandalkan hasil kopra untuk penghidupan. Dalam pengelolaannya, masyarakat dapat menerapkan sasi sendiri untuk pohon kelapa yang menjadi milik pribadi jika dirasa perlu; tanpa perlu izin petuanan adat.

Terakhir, untuk menambal penghidupan, sebagian ibu-ibu di kampung mencoba membuat kerajinan makanan olahan, seperti misalnya produk “abun-abun”. Namun ini dianggap belum berhasil karena terkendala masalah pemasaran produk. Saat ini, dana kampung Kambala tidak dialokasikan untuk mendukung penyelesaian masalah tersebut; dimana alokasi dana diprioritaskan untuk pembangunan fisik jalan/rumah, kesehatan dan pendidikan. Seiring dengan

itu, harapan masyarakat adalah pemerintah daerah bisa memfasilitasi lapangan kerja pada ibu-ibu dan juga warga masyarakat Kambala yang membutuhkan, khususnya yang putus sekolah.

#### **KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN PERIKANAN**

## Kampung Air Besar

### KARAKTER ETNOLOGIS

Kampung Air Besar yang terletak di Distrik Fak-fak Tengah, Kabupaten Fak-fak, ini berada di wilayah Petuanan Fatagar, yang terletak berdekatan dengan Petuanan Ati-ati. Pimpinan-pimpinan adat di Air Besar direpresentasikan oleh gelar-gelar atau simbol-simbol kekuasaan adat seperti Kapitan (Bpk. Nelson Heritenggi), Mayor (Bpk. Evan Shorik), Sangaji (Bpk. Edward Habrow), dan Warnemen (Bpk. Djohan Darmana). Keempat pemangku adat ini bertanggung jawab terhadap urusan-urusan dalam kehidupan yang berkaitan dengan adat-istiadat, konflik adat atau tenurial, dan keberlangsungan praktek kebudayaan.

Kondisi sosial-budaya di kampung ini sangat plural dari segi suku maupun agama. Dari sisi suku bangsa, sudah banyak pendatang yang tinggal dan bermukim di kampung ini, contohnya dari suku Bugis, Maluku, dll. Sementara dari segi agama, mayoritas anggota masyarakat beragama Kristen. Terdapat 598 anggota masyarakat yang beragama Kristen dan hanya 6 orang yang beragama Islam. Namun, kedua agama mayoritas ini hidup berdampingan secara harmonis bahkan saling bantu-membantu dalam aktivitas keagamaan, misalnya pembangunan rumah ibadah. Bahkan agama minoritas bisa menduduki posisi tinggi di desa, contohnya, Kepala Kampung saat ini yang berasal dari suku campuran Makassar-Papua yang beragama Islam. Nilai toleransi ini mencerminkan fondasi nilai filosofis masyarakat Fak-fak: “satu tungku, tiga batu”. “Satu tungku, tiga batu” merepresentasikan tiga agama mayoritas di Fak-fak, yaitu Islam, Protestan, dan Katolik. Bahwa tiga batu yang berbeda bisa berada di dalam satu tungku yang sama dalam posisi seimbang sehingga kualiti hidup stabil, selayaknya tiga agama yang berbeda bisa hidup dalam satu lingkungan yang sama secara harmonis.

### KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN BAKAU DAN NON-BAKAU

#### Bakau

Di ekosistem bakau, masyarakat cenderung tidak mengandalkan komoditas hewan berbasis mangrove, seperti ikan, udang dan kepiting sebagai sumber penghidupan utama. Ini dikarenakan

persepsi masyarakat yang secara umum belum merasa perlu memanfaatkan komoditas hewan mangrove, dimana masyarakat banyak mengandalkan perkebunan pala sebagai sumber penghidupan. Hanya beberapa kelompok warga saja yang telah memahami potensi dan besarnya manfaat ekonomi dari kepiting yang ada di area bakau. Sejauh ini, ada kurang dari 5 orang di kampung yang memanfaatkan hasil ikan dan kepiting di bakau.

Untuk ikan, jika hasil yang didapat dari memancing banyak, maka akan dijual oleh warga ke pasar di Fakfak; jika tidak, maka hanya akan dimakan sendiri. Alat pancing ikan di mangrove menggunakan berbagai jenis perangkap dan alat pancing, ada yang berupa bubut dan ada yang nilon. Sedangkan untuk kepiting, hasil tangkapan selalu dijual dan tidak pernah dimakan sendiri. Hal ini mempertimbangkan harganya yang cukup tinggi: 1 ikat kepiting bisa dihargai 50-100 ribu rupiah, dimana 1 ekor kepiting rata-rata mencapai sekitar 1 kg. Untuk udang, hasil tangkapan juga dijual ke pasar di Fakfak; dimana musim penangkapan udang bagi masyarakat biasanya ada di periode Oktober-Desember tiap tahunnya.

Terkait mangrove sendiri, masyarakat lebih banyak memanfaatkan kayu pohon mangrove untuk kebutuhan kayu bakar dan juga untuk dijual. Satu meter kubik kayu bisa dihargai sebesar 200 ribu rupiah. Lokasi pengambilan kayu mangrove antara lain di dekat dermaga kampung. Masyarakat mengambil kayu dari mangrove sebagai alternatif pengambilan kayu dari hutan alam; dimana persepsi masyarakat adalah bila pohon hutan alam ditebang maka akan butuh waktu lama untuk proses penghijauan-nya dan itu akan berdampak ke sumber air masyarakat. Sebelum tahun 2015, pengambilan kayu dibebaskan, bahkan orang yang datang dari luar kampung dapat mengambil kayu mangrove tersebut. Hal ini berdampak pada jumlah pohon bakau yang menurun, sehingga juga mempengaruhi area kepiting berkembang biak. Setelah tahun 2015, pengambilan kayu mangrove sudah mulai dibatasi oleh pemerintah kampung, diikuti dengan praktek pengawasan. Namun, pengawasan tersebut masih belum diikuti penerapan batas maksimum pengambilan kayu.

## **Non-Bakau**

### **Pala**

Dibandingkan dengan komoditas mangrove, masyarakat kampung Air Besar bergantung pada komoditas pala sebagai mata pencaharian utama. Pala di Air Besar umumnya baru berbuah setelah ditanam selama 7-15 tahun; setelah mulai berbuah, dalam setahun pala bisa dipanen 2-3 kali (umumnya mulai panen bulan Oktober dan Juni). Yang dijual oleh masyarakat dapat berupa pala mentah (i.e. bunga dan biji pala tidak dipisah) maupun pala olahan (i.e. biji dan bunga pala dijual terpisah).

Untuk menjaga kualitas pala yang dipanen di kampung Air Besar, terdapat kebijakan sasi pala yang diterapkan. Sasi tersebut bertujuan memastikan hanya pala yang sudah masak (i.e. kualitasnya baik) yang dipetik. Untuk itu, tokoh adat dan kepala desa akan bersama-sama menentukan tanggal untuk masyarakat buka sasi, i.e. mulai bisa panen pala. Tanggal tersebut kemudian diberitahukan langsung pada masyarakat. Tidak ada upacara adat khusus yang dilakukan untuk pembukaan sasi. Namun, ada ketentuan adat bagi pihak yang melanggar sasi, i.e. memetik pala sebelum periode buka sasi. Ketentuan tersebut berupa denda wajib setor hasil pala ke petinggi adat setempat.

Besarnya panen per orang/KK bergantung pada besarnya kepemilikan tanah. Berdasar informasi yang diperoleh, rata-rata satu KK di kampung bisa panen pala mencapai 2.5 ton dalam 1 periode panen. Kepemilikan tanah kebun pala sendiri di Air Besar diwariskan per marga, dimana hanya orang asli Papua saja yang punya hak kepemilikan. Untuk orang non-asli Papua (yang dalam bahasa lokal disebut Tomborpeja), hanya dapat memanen buah pala saja dengan seizin pemilik lahan; hal ini berlaku jika misalnya orang tersebut lahir dari ayah asli Papua dan ibu non-Papua, atau sebaliknya. Batas kepemilikan tanah kebun pala antar marga sendiri biasanya berupa batas tradisional seperti batu atau pohon; tidak menggunakan semen maupun pagar.

Mempertimbangkan faktor harganya yang lebih tinggi di pasaran, pala yang dijual biasanya adalah pala kering. Terkait harga pala kering ini, kualitas pala mempengaruhi harga. Klasifikasi kualitas ini dibagi menjadi 3 kelas: 1) pala kelas 1 (kualitas bagus): rata-rata dihargai



70 ribu rupiah per kg; 2) pala kelas 2 (pala agak cacat/terkupas): rata-rata dihargai 50 ribu rupiah per kg; pala kelas 3 (pala hancur) dihargai rata-rata 20 ribu rupiah per kg. 1 kg pala sendiri dapat mencapai 50-100 biji pala, tergantung besar kecilnya ukuran pala.

Berbagai tantangan, harapan dan peluang muncul sehubungan dengan penghidupan masyarakat berbasis komoditas pala. Pertama, terkait dengan peran pemerintah daerah. Masyarakat mencatat beberapa kali dinas daerah masuk ke desa, diantaranya dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas sosial dan dinas pemberdayaan masyarakat. Persepsi masyarakat setempat adalah sampai saat ini belum ada pendampingan yang intensif dari pemerintah daerah untuk mendukung ekonomi masyarakat berbasis pala. Peningkatan kapasitas dibutuhkan khususnya untuk pembuatan dan pemasaran produk olahan pala seperti sirup, mentega, dan manisan. Saat ini, masyarakat hanya menjual produk olahan pala berbasis pesanan, alias dalam skala kecil saja. Selain itu, mesin pengupas pala yang seharusnya dapat digunakan dipakai beberapa kali saja. Masyarakat mengharapkan peran dinas terkait untuk bisa membantu masyarakat meningkatkan produktivitas pengolahan pala saat ini mengalami kerusakan, setelah sebelumnya hanya memperbaiki mesin tersebut, mengingat dana koperasi desa saat ini dirasa lebih banyak dipergunakan dananya justru untuk kepentingan pribadi. Kedua, terkait dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), yang baru didirikan di kampung Air Besar per tahun 2019. Meski perannya dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat kampung, misalnya untuk produk berbasis olahan pala, pengembangan kapasitas manajemen pengurus BUMKam masih dirasa diperlukan. Ini agar masyarakat bisa independen mengelola sumber daya yang ada untuk mendukung pengembangan ekonomi kampung. Tantangan terakhir adalah terkait harga pala. Persepsi masyarakat adalah bahwa harga pala cenderung tidak stabil dan ini berdampak negatif ke masyarakat. Ketidakstabilan harga ini dipengaruhi oleh adanya cukong, yaitu pembeli-pembeli pala perorangan yang dapat mempengaruhi harga jual pala di kampung-kampung yang berbeda, termasuk juga di Air Besar. “Di sini mungkin dia beli lima ratus. Nanti dia sebentar (dia) lewat lintas satu kampung, dia tidak mau beli di situ lima ratus, karena mungkin dia lihat yaah.. di sini belum banyak orang yang beli.”

Untuk mengatasi hal tersebut, kampung Air Besar menerbitkan peraturan desa (Perdes) mengenai distribusi dan pembelian pala. Isi Perdes tersebut meliputi kewajiban membayar retribusi dari cukong tersebut pada pemerintah desa, sebagai bentuk kompensasi atas faktor harga tadi. Meskipun dipatok retribusinya pada kisaran 3-5 juta rupiah, pada prakteknya cukong biasanya diminta retribusi sebesar 500 ribu rupiah. Terlepas dari kebijakan tersebut, masyarakat kampung tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan pembeli / cukong tersebut kabur untuk membeli pala di desa lain; karena masyarakat meyakini kualitas pala di kampung Air Besar adalah salah satu yang terbaik di Fakfak.

### **Non-pala**

Selain pala yang menjadi komoditas dominan di Kampung Air Besar, sebagian masyarakat juga mengelola komoditas lain seperti ternak (ayam, itik) serta buah-buahan (e.g. durian, rambutan). Namun, keduanya sejauh ini belum menjadi andalan masyarakat kampung. Terkait ternak, persepsi masyarakat adalah pengelolaan ternak cenderung rentan di kampung, karena ada beberapa pihak yang suka memberi racun pada ternak tersebut.

### **KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN PERIKANAN**

## Kampung Pahger Nkendik

### KARAKTER ETNOLOGIS

Kampung Pahger Nkendik berada di Distrik Fak-fak Barat, Kabupaten Fak-fak. Terletak di wilayah yang berbukit-bukit, pada jaman dahulu dua marga besar, Kuhuor dan Iha, mendiami wilayah tersebut. Semakin meningkatnya jumlah populasi, lokasi pemukiman semakin menyebar. Lokasi pemukiman awal biasa disebut dengan Mahatimba, yang berarti mahakuasa. Wilayah Mahatimba kemudian mekar menjadi Kampung Werba yang berasal dari kata Warbayah yang berarti sejenis ikan kerapu. Pada tahun 2015, Kampung Werba pun dimekarkan kembali menjadi Kampung Pahger Nkendik yang berarti kebun mangga.

Terletak di wilayah Petuanan Ati-ati, terdapat beberapa marga lain selain dua marga besar, Kuhuor dan Iha. Marga-marga tersebut antara lain, Nortonggo, Kabes, dan Hindom. Selain itu juga ada pendatang dari Maluku, Bugis, dll. Selayaknya kampung lain, terdapat gelar-gelar adat juga yang menjadi bagian kehidupan kebudayaan mereka, seperti Kapitan, Dejau, Warnemen, dan Mayor. Seorang tokoh adat di kampung ini menjelaskan bahwa merujuk pada aspek kesejarahan pada jaman colonial Belanda, pemberian gelar-gelar ini dilakukan untuk mempermudah proses penagihan pajak dari rakyat. Gelar-gelar atau pangkat-pangkat adat ini hingga saat ini masih dipertahankan dan seringkali dirujuk atau dikooptasi dalam sistem pemerintahan administrasi desa. Misalnya, di kampung ini, kepala kampung berasal dari gelar Warnemen. Selain terlibat dalam sistem pemerintahan desa, para pemangku gelar adat ini bertugas untuk mengawal keberlangsungan tradisi dan praktek kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya terkait urusan tenurial, perkebunan, pertanian, konflik, kawin mengawin, dan pengelolaan sumber daya alam.

### KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN BAKAU DAN NON-BAKAU

#### Bakau

Di ekosistem bakau, saat ini masyarakat Pahger Nkendik memanfaatkan kayu mangrove secara sangat terbatas untuk kehidupan sehari-hari, misal untuk rumah panggung atau kayu bakar.

Penggunaan kayu saat ini lebih banyak bersumber dari kayu besi serta hutan alam di lokasi kampung. Sementara itu, hanya sekitar 1-2 orang saja di kampung yang mencari ikan di ekosistem bakau, baik untuk dimakan sendiri ataupun dijual. Seiring dengan pemanfaatan terbatas itu, masyarakat tidak menerapkan kebijakan sasi di ekosistem mangrove. Menurut masyarakat setempat, sasi bisa diperlukan suatu saat jika eksploitasi mangrove akan dilakukan oleh perusahaan, atau komoditas bakau akan dimanfaatkan lebih besar semisal untuk kebutuhan ekspor.

Persepsi masyarakat saat ini terkait hutan bakau adalah bahwa terlepas dari pemanfaatannya yang cenderung terbatas, habitat bakau setempat tetap membutuhkan penanaman dan pemeliharaan dengan bantuan pemerintah; ini supaya habitat bakau tetap dapat dilestarikan untuk anak cucu di kampung. Seiring persepsi ini, pemerintah daerah sendiri sudah pernah melakukan proyek penanaman mangrove tahun 2017 di kampung Pahger Nkendik. Namun, menurut masyarakat tanaman tersebut tidak tumbuh dengan baik karena perawatannya kurang optimal.

### **Non-Bakau**

Seperti dijelaskan di atas, seiring pemanfaatan kayu yang terbatas di mangrove, masyarakat juga mengambil kayu dari hutan alam di areal kampung untuk kebutuhan sehari-hari. Persepsi masyarakat saat ini terkait hutan alam adalah bahwa seiring aktivitas pengambilan kayu tersebut, dari waktu ke waktu lokasi pemungutan kayu hutan alam dirasa semakin jauh dari lokasi pemukiman penduduk. Dulunya, lokasi pemungutan kayu dirasa masih dekat dari pemukiman sehingga memudahkan proses pengambilan.

### *Pala*

Pemanfaatan pala menjadi sumber penghidupan utama masyarakat kampung Pahger Nkendik. Hal ini dikarenakan faktor frekuensi panen pala yang cukup tinggi, ketahanan tanaman pala yang cukup lama, serta harga jualnya sendiri. Di Pahger Nkendik, panen pala bisa mencapai 3

kali setahun. Di setiap tahunnya, musim panen pala dibagi tiga: musim barat (Oktober-Desember), musim timur (Maret-Mei), dan musim ekstra panen (sekitar periode awal tahun). Untuk satu pohon pala rata-rata sekali berbuah bisa mencapai 1000-2000 biji. Selain itu, tanaman pala bisa bertahan hingga kurun waktu 5 tahun, sehingga membuat masyarakat tidak perlu mengeluarkan modal lebih setiap tahunnya untuk penanaman kembali pala pasca panen.

Harga jual pala sendiri disesuaikan dengan kualitas pala; dan biasa dijual secara terpisah untuk biji dan bunganya. Harga jual bunga pala berkisar 120 ribu rupiah per kg, sedangkan harga jual biji pala berkisar 200 ribu rupiah per kg. Menurut informasi dari masyarakat setempat, ada Peraturan Daerah yang mengatur standar harga jual pala; dimana harga per 100 biji pala dipatok hingga maksimal 50 ribu rupiah. Dalam satu periode panen, 1 KK di Pahger Nkendik bisa panen hingga mencapai 20 ribu biji pala; sehingga rata-rata pendapatan per KK yang didapat dari 1 periode panen pala bisa mencapai 10 juta rupiah.

Dari segi pengelolaan, batas kepemilikan wilayah kebun pala di Kampung Pahger Nkendik adalah berdasar wilayah marga. Sehingga, jika seseorang hendak mengambil panen pala dari lahan yang dimiliki marga yang berbeda, maka pengambilan harus dengan seizin pemilik lahan tersebut. Meski demikian, dimungkinkan bagi masyarakat setempat untuk saling bekerjasama dalam proses panen pala. Kerjasama tersebut dapat diikuti dengan pembagian hasil panen atas dasar kekeluargaan. Pemanenan pala sendiri di Pahger Nkendik secara umum dilakukan dengan alat tradisional. Alat tersebut terbuat dari bamboo yang diikat dengan paku dan tali nilon, sehingga menyerupai bentuk pisau yang melengkung.

Untuk menjaga kualitas panen pala, kampung Pahger Nkendik menerapkan sasi pala, dimana periode waktu sasi didasarkan estimasi waktu panen yang diperlukan untuk menjaga mutu pala tersebut. Dengan demikian, waktu pembukaan sasi diukur dari kondisi kemasakan pala pada saat itu. Jika dianggap sudah waktunya pembukaan sasi, maka pembukaan sasi akan diumumkan secara adat ke seluruh masyarakat oleh petinggi adat setempat. Petinggi adat bisa meliputi ketua suku, mayor, atau sangaji. Pelanggaran terkait batas kepemilikan pala maupun sasi dapat diganjar dengan denda adat. Denda adat diputuskan setelah dilakukan musyawarah

adat bersama dengan kepala kampung; dimana denda dapat berupa perhiasan semisal emas atau gelang.

Sejauh ini, ada berbagai tantangan pemanfaatan dan pengelolaan pala yang dirasakan masyarakat kampung. Pertama, terkait dengan harga pala. Terlepas dari adanya Perda harga pala seperti dijelaskan di atas, persepsi masyarakat melihat bahwa harga pala saat ini masih cenderung naik turun. Hal ini ditengarai masyarakat utamanya bersumber dari penadah hasil pala setempat yang berlokasi di Surabaya, dimana penadah tersebut memiliki kuasa menentukan naik turunnya harga jual pala dari Pahger Nkendik. Kedua, adalah terkait dengan belum optimalnya proyek penanaman pala yang diinisiasi dinas pertanian daerah. Sejauh ini, menurut masyarakat, terdapat sekitar 100-150 pohon pala yang telah difasilitasi penanamannya. Faktor yang mempengaruhi optimalitas tersebut menurut persepsi masyarakat adalah tidak sinkronnya jenis kelamin pala yang ditanam tersebut. Lebih lanjut, seharusnya ada sinkronisasi antara jenis pohon pala yang jantan dan jenis pohon pala betina dalam proses penanaman; sehingga membantu kesuburan pohon.

### *Non-pala*

Selain pala, masyarakat juga mengelola berbagai tanaman sayur dan buah dalam skala kecil. Dalam istilah setempat, tanaman ini dibagi dua: 1) tanaman jangka panjang, yang meliputi rambutan dan kelapa; serta 2) tanaman bukan jangka panjang, yang meliputi sayur-sayuran semisal sawi.

Selain tanaman sayur dan buah, ibu-ibu setempat juga mulai mencoba membuat produk olahan berupa anyam-anyaman serta sirup pala. Namun, pengelolaan produk olahan ini masih belum optimal di kampung Pahger Nkendik. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, belum adanya pelatihan untuk ibu-ibu tersebut. Saat ini, ibu-ibu setempat mengharapkan adanya pelatihan terkait dengan jahit-menjahit, pembuatan karangan bunga, serta pembuatan manisan pala. Kedua, produk olahan pala semisal sirup pala sampai saat ini hanya dijual langsung ketika ada turis yang datang. Belum ada mekanisme penjualan produk secara berkala melalui ibukota



kabupaten. Ketiga, dari segi pendanaan kampung juga belum dapat mendukung proses diversifikasi pendapatan ini. Sejauh ini, dana kampung dominan digunakan untuk membantu pembangunan fisik rumah warga setempat.

#### **KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN PERIKANAN**

## Kampung Mandoni

### KARAKTER ETNOLOGIS

Kampung Mandoni terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fak-fak. Bisa dikatakan 100% masyarakat di kampung ini memeluk agama Islam. Di Kampung ini paling tidak terdapat empat marga besar di kampung Mandoni: Ramandondo, Tiguria, Bahbah, dan Horobat. Dari keempat marga tersebut, marga Ramandondo mayoritas dimiliki oleh masyarakat Mandoni. Empat marga ini yang pertama kali mendiami wilayah yang sekarang disebut Kampung Mandoni. Selain empat marga tersebut, terdapat marga lain yang juga berasal dari Papua tapi berbeda wilayah, contohnya Ginuny, Baruli, Kabes, Mihang. Semenjak tahun '80-an, orang-orang dari luar Papua mulai berdatangan, kawin, dan bermukim di Mandoni, antara lain dari Jawa, Madura, Maluku, dan Sulawesi.

Berdasarkan penuturan seorang tokoh adat, masing-masing Marga besar memiliki gelar-gelar adatnya. Ramandondo bergelar Kapitan, Tiguria bergelar Sangaji, Bahbah bergelar Kapitan, dan Horobat bergelar Mayor. Dulu, Raja dari Petuanan Pik-Pik Sekar, di mana kampung ini berada, hanya memberikan gelar Kapitan sebagai pemimpin kampung, sebagai perpanjangan tangan raja. Namun, seiring bertambahnya jumlah populasi, gelar-gelar lain selain Kapitan diberikan kepada marga-marga yang lain. Masing-masing tetua adat yang mendapatkan gelar tersebut bertanggung jawab untuk masing-masing wilayah adatnya. Tradisi dan kebiasaan ini terus dilakukan secara turun temurun dilakukan hingga saat ini, tentu dengan fungsi yang secara prinsip masih sama, tapi menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi jaman. Jika dulu para tetua adat berperan penting dalam mengawasi batas-batas kampung atau tanah ulayat dari kampung-kampung di sekelilingnya, saat ini tugas mereka berkembang menjadi, misalnya, memperjuangkan hak ulayat dari pihak luar yang ingin membuka usaha di wilayah mereka.

## KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN BAKAU DAN NON-BAKAU

### Bakau

#### *Karaka (kepiting bakau)*

Di ekosistem bakau, masyarakat mengandalkan kepiting mangrove atau “karaka” sebagai komoditas penghidupan utama. Seiring hal tersebut, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan kepiting. Penghidupan berbasis karaka mulai menggeliat di desa sejak sekitar tahun 2003. Awalnya saat itu, pembeli dari luar desa membeli rajungan dari Mandoni. Lama-kelamaan pembeli juga mengincar komoditas hewan mangrove seperti kepiting bakau maupun bia kodok. Karaka dari Mandoni umumnya dikirim lebih dulu ke Fakfak, sebelum kemudian dikirim ke seluruh Indonesia seperti Surabaya, Ambon, Jambi, Makassar.

Standarnya, karaka dijual dengan harga terendah 80 ribu rupiah per kg; hasil wawancara menyebutkan bahwa nilai ini merupakan ambang batas terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam seminggu, masyarakat Mandoni dapat menjual sekitar 300-500 kg kepiting.

Profesi nelayan kepiting tidak hanya didominasi bapak-bapak, tapi ibu-ibu juga aktif menangkap kepiting untuk dijual. Terkait ini, kami memperoleh cerita dari beberapa ibu-ibu setempat yang berhasil membiayai anaknya kuliah di luar kota bermodalkan hasil jual kepiting. Nelayan-nelayan tersebut dapat menangkap karaka baik siang maupun malam hari; hal ini berbeda dengan jenis hewan mangrove lain ataupun rajungan yang biasa ditangkap di siang hari saja.

Untuk menangkap kepiting, masyarakat kampung menciptakan alat pancing yang terbuat dari rotan dan jaring nilon; dengan umpan pancing berupa potongan daging ikan hiu ukuran kecil. Inovasi alat tangkap ini dianggap meningkatkan produktivitas tangkapan kepiting masyarakat, jika dibandingkan penggunaan tombak yang dipakai masyarakat zaman dulu. Dengan bermodal alat tangkap tersebut, dalam sekali jalan 1 perahu yang digunakan nelayan kepiting dapat memuat hingga 20 kg kepiting.

Berbagai tantangan dan peluang muncul dalam pengelolaan kepiting di kampung Mandoni. Daris segi tantangan, ada dua tantangan utama. Pertama, terkait dengan persepsi

masyarakat saat ini bahwa dari waktu ke waktu jumlah kepiting yang dapat ditangkap dalam sekali jalan memancing dirasa semakin sedikit. Pada saat yang sama, belum ada penerapan budidaya karaka di kampung; dimana masyarakat belum memiliki pengetahuan budidaya, dan pelatihan budidaya juga belum pernah dibuat. Pada saat yang sama, tidak ada kebijakan sasi adat yang diterapkan untuk karaka. Sejauh ini, pengelolaan karaka didasarkan pada kesadaran masyarakat untuk memilah-milah hasil tangkapan berdasar ukurannya. Kedua, persepsi masyarakat adalah sampai saat ini, belum ada pembeli karaka yang tetap selama 12 bulan penuh dalam setahun, sehingga berdampak pada fluktuasi pendapatan masyarakat. Pembeli karaka selama ini dominan muncul di bulan-bulan tertentu saja, semisal di bulan Juni-Juli dan September-Oktober. Sehingga, masyarakat mengharapkan adanya inovasi pemasaran lain semisal ekspor ke luar negeri untuk mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Terakhir, dari segi peluang, ibu-ibu di kampung sejauh ini sudah dapat berinovasi membuat abon kepiting sendiri. Produk olahan ini dibuat tanpa adanya pelatihan atau pendampingan dari dinas. Namun, potensinya dalam meningkatkan pendapatan masih terkendala oleh faktor pengemasan dan pemasaran yang masih terbatas; sehingga ibu-ibu setempat mengharapkan adanya pelatihan atas hal tersebut. Sampai saat ini, pelatihan terkait dari pemerintah lebih berupa sosialisasi atas pentingnya pengelolaan kepiting bakau yang berkelanjutan. Hal ini meliputi anjuran melepas tangkapan kepiting berukuran kecil, dan hanya menangkap kepiting yang berukuran besar.

#### *Non-karaka*

Selain karaka, di ekosistem bakau masyarakat juga memanfaatkan bia / kerang serta kayu untuk kebutuhan sehari-hari. Terkait bia bakau, bia dimanfaatkan masyarakat secara terbatas untuk kebutuhan makan sehari-hari. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh belum adanya pengetahuan dari masyarakat untuk mengeringkan tangkapan bia, yang dapat membantu proses penyimpanan bia. Seiring dengan model pengelolaan bia tersebut, persepsi masyarakat melihat habitat bia masih cenderung lestari, belum dirasa berkurang jumlah tangkapannya. Sampai saat ini, seperti halnya pengelolaan karaka, belum ada sasi yang diterapkan untuk komoditas bia.

Sedangkan terkait kayu bakau, ada persamaan dan perbedaan penggunaan kayu bakau antara dulu dan saat ini oleh masyarakat. Persamaannya adalah bahwa pemanfaatan kayu lebih untuk kebutuhan sehari-hari Dulu, masyarakat cenderung mengandalkan kayu bakau untuk kebutuhan sehari-hari semisal kayu bakar atau pembangunan rumah. Saat ini, masyarakat lebih banyak menggunakan kayu besi dibandingkan kayu bakau. Hal ini dilandasi pengetahuan bahwa kayu besi memiliki kualitas yang lebih baik untuk tujuan tersebut dibandingkan kayu bakau, serta persepsi bahwa hutan bakau merupakan aset yang perlu dilestarikan untuk kebutuhan masa depan. Seiring dengan itu, persepsi masyarakat juga melihat bahwa kondisi mangrove saat ini masih lestari; dimana jumlah pohon bakau dirasa semakin bertambah banyak dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan pohon-pohon baru yang berasal dari buah pohon bakau yang jatuh ke tanah.

### **Non-Bakau**

#### *Pala*

Di luar ekosistem bakau, masyarakat dominan memanfaatkan komoditas pala. Adanya pohon pala di Mandoni sudah sejak zaman leluhur masyarakat setempat, dimana pertumbuhan pohon-pohon pala baru berasal dari bibit pohon pala yang sudah ada. Ini ditambah dengan pemberdayaan pohon pala oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat setempat, menggunakan bibit yang difasilitasi oleh pemerintah. Kepemilikan area kebun pala di Mandoni sendiri adalah berdasar marga. Dengan demikian, pengelolaan pala yang melintasi wilayah marga lain harus dilakukan dengan seizin pemilik dari marga yang bersangkutan.

Panen pala di Mandoni dilakukan dalam 2 kali periode dalam setahun. Kedua periode tersebut terbagi menjadi musim barat (periode Januari-Juni) dan musim timur (Juni-Desember). Untuk menjaga kualitas pala yang dipanen, masyarakat kampung menerapkan sasi pala. Penerapannya adalah berupa pemilihan pala yang dipanen, dimana pala yang masih putih (i.e. belum masak) tidak boleh dipanen. Periode sasi ini paling lambat diberlakukan selama 3 bulan sebelum akhir musim tertentu; sebagai contoh untuk musim barat, maka sasi diberlakukan

selama periode April-Juni. Sanksi adat diterapkan bagi anggota masyarakat yang melanggar ketentuan sasi tersebut.

Di Mandoni, pala dijual langsung ke ibukota kabupaten Fakfak. Rata-rata harga jual dibedakan berdasar kualitas pala. Pala yang sudah masak/tua dihargai 500 ribu rupiah per kg (i.e. 1 kg kira-kira 1000 biji); sedangkan pala yang masih ada kandungan warna putih (i.e. belum masak benar) dihargai sekitar 450 ribu rupiah per kg. Bergantung pada besarnya kepemilikan lahan kebun pala, dalam satu periode panen besarnya panen pala per KK di Mandoni bisa mencapai antara 100-1000 kg.

Harapan dari masyarakat terkait penghidupan berbasis pala adalah bahwa ada pelatihan untuk pembuatan dan pemasaran produk olahan sirup pala. Sampai ketika wawancara dilakukan, rencana pelatihan pembuatan manisan pala dari pemerintah baru hendak dilakukan.

#### *Non-pala*

Selain pala, tidak banyak komoditas non-mangrove yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Beberapa ibu-ibu membuat anyaman tikar dan tas noken sebagai alternatif penghasilan. Produk tersebut kemudian dijual ke luar desa. Namun sampai saat ini, penjualan masih bersifat skala kecil-kecilan dan belum masif.

## **KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN PERIKANAN**

## Kampung Modan

### KARAKTER ETNOLOGIS

Kampung Modan terletak di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni. Secara lebih lengkap, Kampung Modan biasa disebut Modan Pisaura, yang bermakna tempat berkumpul bersama-sama. Awalnya, pada masa Kesultanan Tidore masih berjaya, lokasi kampung Modan terletak di Pulau Modan di wilayah Distrik Wamesa. Keterbatasan sumber air bersih membuat pemerintah setempat memutuskan untuk memindahkan lokasi kampung ke Distrik Babo sekitar tahun 1932.

Mayoritas masyarakat Kampung Modan memeluk agama Islam. Marga yang paling besar di kampung ini adalah Simbaik. Marga ini merupakan marga asli ketika lokasi desa masih berada di distrik Wamesa. Setelah pindah ke Babo, terjadi banyak perkawinan antar-marga, sehingga terdapat juga marga lain, seperti Peperandi, Buara, Wamana, Aori. Terdapat dua gelar adat yang menurut informan diberikan oleh pemerintahan colonial Belanda dan Sultan Tidore, yaitu Kapitan dan Mayor. Marga Simbaik memiliki gelar Kapitan, sementara marga Peperandi bergelar Mayor. Selain marga-marga ini, ada juga pendatang dari daerah lain yang sudah bermukim di kampung ini, contohnya dari daerah Makassar, Maluku, dan Buton.

### KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN BAKAU DAN NON-BAKAU

#### Bakau

##### *Karaka*

Komoditas bakau yang menjadi andalan penghidupan masyarakat adalah kepiting. Umumnya, masyarakat menggunakan alat tangkap khusus untuk memancing kepiting; setelah ditangkap, kepiting dimasukkan ke dalam keranjang yang dapat dibuat dari jahitan karung maupun anyaman tali genimo (melinjo). Dalam bahasa lokal, keranjang tersebut disebut “noket”.

Tangkapan kepiting dari Modan dibawa dan dijual ke Sorong dengan menggunakan moda transportasi kapal; kemudian, kepiting tersebut biasanya akan disuplai ke Jakarta dengan pesawat. Di Modan sendiri, ada 4 penadah untuk komoditas kepiting. Penadah tersebut dapat

membawa tangkapan kepiting langsung ke Sorong. Dalam seminggu, rata-rata 1 KK dapat berkontribusi sebesar 3 boks kepiting (i.e. 90-150 ekor kepiting) untuk dibawa ke Sorong.

Rata-rata harga jual kepiting bakau dari kampung Modan ditetapkan berdasar ukuran, yang dalam bahasa lokal disebut “hak”. Tidak ada standar penetapan harga jual minimum yang ditentukan dari pemerintah; keseluruhan harga jual ditetapkan berdasar kesepakatan masyarakat Modan sendiri. Ukuran 2 hak (i.e. kisaran 200 gram) harganya mencapai 15-40 ribu rupiah per kg bergantung pada fluktuasi harga jual. Ukuran 3 hak (i.e. kisaran 300 gram) harganya bisa mencapai 60 ribu rupiah per kg. Sedangkan ukuran 5 hak (i.e. kisaran 500-1000 gram) harganya dapat mencapai 80-100 ribu rupiah per kg.

Untuk menangkap kepiting, tidak ada musim yang dijadikan acuan. Sehingga, memungkinkan bagi nelayan untuk mencari kepiting setiap hari. Waktu penangkapan harian tersebut hanya bergantung pada jam pancing, yaitu jam dimana potensi kepiting yang dapat ditangkap lebih banyak. Biasanya, waktu terang bulan adalah jam yang dihindari nelayan, karena pada saat tersebut isi daging kepiting tangkapan biasanya kurang besar.

Dari segi pengelolaan komoditas, masyarakat Modan terbiasa memilah-milah hasil tangkapan kepiting berdasar jenis kelamin (i.e. hanya jantan saja yang ditangkap, sedangkan betina ditangkap seperlunya saja atau dilepas) dan ukuran (i.e. kepiting dengan estimasi berat di bawah 200 gram tidak ditangkap). Faktor ukuran tersebut juga dipengaruhi oleh aspek pasar: pembeli di Sorong biasanya tidak menerima kepiting dengan ukuran di bawah 300 gram.

Juga, masyarakat Modan menerapkan retribusi bagi nelayan luar kampung yang mencari komoditas di areal pencarian masyarakat kampung. Besaran retribusi ditetapkan berdasar aturan masing-masing petuanan di Modan (e.g. marga Simbaid, marga Uwar, dll), dan besarnya rata-rata mencapai 300-500 ribu rupiah. Retribusi ditetapkan masyarakat karena mempertimbangkan banyaknya nelayan yang datang dari luar desa; khususnya dari daerah Buton, Sulawesi Tenggara. Persepsi masyarakat melihat bahwa nelayan Buton memiliki cara penangkapan berbasis tangkap habis, sehingga berpotensi mengganggu kelestarian habitat lokal.

Terlepas dari aturan retribusi tersebut, masyarakat Modan sejauh ini tidak menerapkan kebijakan sasi, baik untuk komoditas kepiting maupun lainnya. Sejanguh ini, persepsi masyarakat



secara umum adalah bahwa sasi belum diperlukan karena sudah ada batas alam yang mengindikasikan kepemilikan wilayah pengelolaan untuk internal desa. *"...yang penting sesuai kerja alam. Terus masing-masing sudah tau batas-batasnya sampai kemana orang ini punya batas, marga ini punya... Batas-batas kita sudah tau, orangtua sudah hafal; jadi tidak usah pasang sasi"*

Terlepas dari penjelasan di atas, terdapat berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi dinamika pengelolaan komoditas kepiting di desa. Hal ini khususnya mempertimbangkan faktor komoditas kepiting yang jadi andalan penghidupan masyarakat. Pertama, belum adanya pelatihan budidaya kepiting untuk masyarakat dari pemerintah. Terkait dengan itu, sebenarnya dinas pemerintah daerah pernah datang membangun lima buah tambak kepiting pada tahun 2017. Namun, berdasar persepsi masyarakat, kepiting di tambak sudah mati semua dikarenakan pencemaran air limbah dari masyarakat; letak bangunan tambak yang dekat dengan pemukiman warga dianggap berkontribusi kepada hal ini. Selain itu, kondisi tambak saat ini sudah lapuk dikarenakan bahan dasarnya terbuat dari kayu mangrove, yang mudah dimakan oleh cacing tambelo. Sampai saat penelitian dilakukan, belum ada perbaikan tambak dari dinas terkait. Kedua, adalah terkait sasi. Ada persepsi sebagian petinggi masyarakat yang muncul bahwa terlepas dari aspek kepemilikan wilayah, sasi sebenarnya dapat diterapkan untuk menguatkan pelestarian komoditas kepiting dan lainnya, baik yang dipengaruhi aktivitas nelayan Modan sendiri maupun dari nelayan asing (luar desa). Namun, ada dua tantangan terkait potensi penerapan sasi ini. Pertama, mayoritas anggota masyarakat belum menyadari betul potensi ancaman kepunahan komoditas laut yang diakibatkan praktek penangkapan kepiting saat ini. Kedua, masyarakat melihat belum adanya Perda yang jelas mengatur ketentuan sasi di skala desa/kampung; hal ini menyebabkan pemerintah kampung Modan merasa kesulitan mencari dasar hukum penerapan sasi.

Terakhir, adalah terkait kebutuhan es. Es dibutuhkan untuk menyimpan hasil kepiting. Saat ini, akses untuk memperoleh es dirasa sulit oleh masyarakat kampung, dikarenakan biaya operasional yang dibutuhkan. Terkait itu, masyarakat mengharapkan adanya 1 induk es di

ibukota kabupaten Teluk Bintuni (i.e. Babo) yang dapat menjadi titik pembelian es yang lebih mudah diakses oleh masyarakat Modan dan kampung lainnya.

### *Non-karaka*

Selain kepiting, yang dimanfaatkan masyarakat untuk dijual adalah tambelo; meskipun harga jualnya tidak tinggi. Cacing tambelo biasanya ditangkap dari kayu bakau yang sudah lapuk, dan terendam di dalam tanah. Tambelo biasanya dapat dijual 10 ribu rupiah per kantong. Selain dijual, tambelo dapat juga dimakan sendiri. Terlepas dari tambelo, komoditas hewan bakau lainnya lebih banyak dimanfaatkan masyarakat untuk dimakan sendiri.

Selain hewan di ekosistem bakau, kayu bakau juga masih dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, antara lain kayu bakar, pembangunan rumah, jembatan, pagar, dan pembuatan keranjang untuk alat tangkap karaka. Meskipun, pemanfaatannya saat ini oleh masyarakat sudah tidak sebesar penggunaan besi atau kayu jadi. Selain faktor kualitas kayu, juga terdapat faktor legal berikut. Saat ini terdapat perusahaan serbuk kayu yang mengelola area bakau di seputaran wilayah kabupaten Teluk Bintuni, yang juga mencakup wilayah kampung Modan. Dengan demikian, pengambilan kayu bakau sejatinya bertentangan dengan aturan perusahaan kayu tersebut. Hal ini mempengaruhi keleluasaan masyarakat Modan memanfaatkan kayu bakau. Persepsi masyarakat Modan sendiri melihat bahwa dalam lingkup wilayah kampung Modan, dari waktu ke waktu perubahan tutupan pohon bakau cenderung bervariasi. Ada bagian areal bakau yang makin lebat, ada juga areal yang makin tipis. Indikasi penipisan tersebut diakibatkan abrasi, dimana dampaknya terasa hingga ke sebagian areal pemukiman di kampung.

### **Non-Bakau**

#### *Kebun sayur & buah*

Sebagai bentuk diversifikasi ekonomi, terdapat perkebunan sayur dan buah yang dibangun oleh masyarakat Modan. Ini melibatkan tidak hanya elemen masyarakat dari kelompok bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu. Sampai dengan Desember 2019, kebun sayur-buah ini terletak di areal distrik

Babo. Areal tersebut dipinjamkan oleh pemerintah distrik, dikarenakan masyarakat Modan masih dalam proses perpindahan lokasi kampung ke pulau Modan secara definitif. Nantinya, setelah status perpidahan definitif (diestimasi tahun 2020), kawasan hutan yang berada dalam areal tanah Pulau Modan direncanakan untuk dibuka untuk perkebunan.

Proses pengelolaan kebun dan hasil kebun tersebut bekerjasama dengan perusahaan migas British Petroleum (BP), dimana BP berperan memberikan bantuan operasional (e.g. pupuk urea) serta sekaligus menjadi pembeli langsung (offtaker) hasil kebun masyarakat. Umumnya, setiap hari Jumat di tiap minggunya masyarakat kampung dapat menyeter hasil kebun tersebut ke BP. Selain itu, dinas daerah juga berperan memberikan pinjaman alat bajak untuk kampung Modan, untuk dipakai bergantian dengan kampung-kampung lainnya yang berdekatan.

Komoditas yang ditanam kampung Modan meliputi: melon, semangka, kangkung cabut, dan pisang. Awalnya, masyarakat juga menanam papaya. Namun, sejak 2017, masyarakat mulai mencari alternatif papaya dikarenakan sudah banyak kampung lain yang juga suplai pepaya ke BP sebagai oftaker. Berdasar referensi dari BP, yang juga memfasilitasi perkebunan rakyat di kampung-kampung lain di Teluk Bintuni, pada dasarnya diharapkan masing-masing kampung memiliki komoditas andalannya masing-masing. Termasuk juga halnya dengan kampung Modan.

Terdapat beberapa tantangan dan peluang terkait pengelolaan kebun sayur dan buah di Modan. Pertama, mengingat lokasi kampung Modan yang secara definitive akan pindah ke Pulau Modan tahun 2020, petugas BP tidak akan dapat menjangkau lokasi Pulau Modan karena terlalu jauh lokasinya menurut indikator standar operasi perusahaan tersebut. Sehingga, ini berpotensi mengganggu koordinasi pengembangan kebun serupa di pulau. Kedua, masih butuh waktu untuk keseluruhan masyarakat kampung Modan untuk memahami pentingnya inovasi dalam mengatasi kendala pengelolaan perkebunan. Saat ini, persepsi sebagian masyarakat masih berada pada tatanan “Setelah tanam lalu selesai, tinggal tunggu panen”. Untuk itu, adanya penyuluh pertanian lapangan (PPL) saat ini yang difasilitasi pemerintah berperan dalam membimbing masyarakat mengelola kebun. Selain itu, kepala kampung Modan menyebutkan

adanya wacana mendatangkan transmigran sebagai bagian dari penduduk kampung Modan, untuk menguatkan kemajuan dan perkembangan di tingkat masyarakat sendiri.

### *Produk olahan*

Terakhir, sebagian ibu-ibu di kampung Modan juga membuat produk olahan berupa abon kepiting, abon ikan sembilan dan sirup jambu. Ibu-ibu tersebut mendapat pengetahuan membuat produk-produk tersebut dari pelatihan yang diberikan oleh mahasiswa UGM tahun 2015. Untuk mendapatkan kepiting untuk pembuatan abon kepiting, ibu-ibu dapat secara mandiri mencari kepiting sendiri. Hal ini sebenarnya sejalan dengan praktek masyarakat setempat di zaman dulu, dimana dulunya bapak-bapak lebih fokus mencari ikan dan ibu-ibu lah yang berperan memancing kepiting.

Pembuatan produk olahan abon kepiting dijelaskan oleh ibu-ibu setempat sebagai berikut: "*....Kepiting diambil, kemudian direbus. Terus (se)sudah masak, kepiting kita angkat. Terus dagingnya dicopot-copot (dan) diambil. Kita siap bumbu bawang putih, bawang merah, saosnya, jahenya. Terus, (kita) tumbuk semua, peras airnya, terus kita sudah siap santan"*

Pembuatan produk-produk olahan tersebut sampai saat ini hanya berdasar pesanan pembeli. Sempat juga sebagian hasil produk olahan dipamerkan dalam acara ulang tahun kabupaten Teluk Bintuni, dimana masyarakat memanfaatkan acara tersebut untuk memasarkan produk abon ikan Sembilan.

Terdapat tantangan yang dialami masyarakat dalam mengembangkan penghidupan berbasis produk olahan ini. Tantangan khususnya terkait dengan akses pemodal, yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan dan pengemasan produk olahan. Dari diskusi kelompok yang dilakukan, terdapat bahwa masyarakat pernah coba mengajukan pinjaman ke bank untuk kredit usaha rakyat (KUR), tapi merasa kesulitan dalam tindak lanjut prosesnya. Sebagai alternatif, sebagian masyarakat meminjam uang ke penadah kepiting; namun, ini dianggap cukup merugikan masyarakat sendiri karena sebagai gantinya, si penadah dapat memotong keuntungan penjualan kepiting dari masyarakat tersebut. Alternatif lainnya yang dicoba masyarakat adalah pengajuan proposal (sebesar 5 juta rupiah) untuk pengembangan usaha

kepada pemerintah kabupaten; namun masyarakat mengaku belum ada jawaban atas proposal tersebut.

Selain pemodalan, tantangan lainnya dari segi tata kelola adalah masih minimnya pengetahuan terkait pemasaran produk olahan; serta, belum adanya badan usaha kampung (BUMKam) yang dapat mengelola usaha-usaha berbasis produk olahan di Modan. Ini dipengaruhi oleh status kampung Modan saat ini yang lokasinya masih belum definitif.

#### **KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN PERIKANAN**

## Kampung Sidomakmur

### **KARAKTER ETNOLOGIS**

Kampung Sidomakmur terletak di Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni. Kampung ini merupakan sebuah kampung transmigrasi yang mayoritas masyarakatnya berasal dari suku Jawa. Nama Sidomakmur dicetuskan pada tahun 2004. Kampung Sidomakmur yang berarti jadi Makmur, dulunya dikenal orang dengan sebutan Wimbro RKI (Rumah Kayu Indonesia) mengingat bangunan-bangunan di sana yang dulu semuanya terbuat dari kayu. Wilayah Kampung Sidomakmur dulunya merupakan wilayah adat sebelas marga asli Papua seluas 10.000 hektar yang telah melalui proses pelepasan pada tahun 1987 untuk menjadi kampung transmigran. Gelombang pertama transmigrasi dari pulau Jawa ke Teluk Bintuni diadakan pada tahun 1991 sebanyak 42 KK, diikuti dengan gelombang kedua sebanyak 50 KK. Mereka didatangkan oleh Jayanti Group sebagai transmigran untuk bekerja sebagai nelayan udang di perusahaan Wimbro, sebuah perusahaan penangkap udang. Sebagai sebuah kampung transmigran, tidak ada struktur adat yang khusus dibentuk, hanya ada struktur pemerintahan desa. Dari sisi adat, mereka tetap melaksanakan adat Jawa, misalnya melakukan praktek syukuran

### **KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN BAKAU**

Di ekosistem bakau, komoditas hewan bakau yang dimanfaatkan utamanya adalah kepiting. Pemanfaatan kepiting setempat meliputi kepiting jantan dan betina. Untuk kebutuhan penjualan skala regional maupun ekspor, kepiting yang dijual hanya kepiting jantan; ini karena mempertimbangkan larangan pemanfaatan kepiting betina dalam skala besar untuk mendukung pelestarian kepiting. Kepiting betina sendiri hanya dijual dalam skala lokal saja.

Harga jual kepiting bergantung pada ukuran kepiting tersebut. Rata-rata 1 kg kepiting dijual ke pengepul di Babo dengan harga 30 ribu rupiah; untuk kemudian dapat dijual hingga ke Sorong. Menurut masyarakat, tidak ada aturan spesifik dari pemerintah daerah yang mengatur harga jual minimum untuk kepiting. Masyarakat mulai memanfaatkan kepiting untuk dijual

sebagai sumber pendapatan sejak tahun 2012, bersamaan dengan sudah adanya pengumpul hasil tangkapan kepiting. Sebelumnya, hasil tangkapan kepiting hanya untuk dimakan sendiri.

Masyarakat kampung Sidomakmur sendiri jarang mengambil kayu dari mangrove untuk kebutuhan sehari-hari, e.g. kayu bakar. Menurut masyarakat, areal hutan bakau di wilayah kampung Sidomakmur serta seputaran wilayah kabupaten Teluk Bintuni sudah berada dalam area kelola perusahaan kayu PT Bumwi (PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries). PT. Bumwi sejak 1988 memanfaatkan kayu di areal bakau Teluk Bintuni untuk membuat bahan baku pulp kertas, untuk kemudian diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Taiwan, RRC. Ini berimplikasi pada terbatasnya akses masyarakat lokal, khususnya dalam hal ini masyarakat Sidomakmur untuk memanfaatkan kayu bakau.

#### **KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN PERIKANAN/NON-BAKAU**

Dari lingkup ekosistem non-bakau, masyarakat kampung Sidomakmur dominan bergantung pada hasil udang laut dan gelembung ikan kakap putih (i.e. kakap Cina) sebagai sumber penghidupan. Diantara udang, kepiting, dan ikan kakap, dalam diskusi masyarakat menyepakati bahwa udang merupakan komoditas terpenting bagi penghidupan masyarakat Sidomakmur; disusul dengan ikan kakap (yang diambil gelembungnya untuk dijual), baru kemudian kepiting. Selain itu, sebagian masyarakat mulai tergerak membuat produk olahan udang untuk mendukung alternatif pendapatan. Terakhir, sebagian ibu-ibu juga menanam sayur, dengan bantuan bibit tanaman dari pemerintah.

#### *Udang*

Mayoritas masyarakat Sidomakmur berprofesi sebagai nelayan udang. Udang yang biasa ditangkap adalah udang jenis: banana, ende dan sima. Udang banana bisa digunakan untuk ekspor, sedangkan udang ende bisa dibikin ebi dan biasanya dijual dalam skala nasional. Sidomakmur sendiri sejak lama terkenal dengan komoditas udang banana. Sejak adanya perusahaan udang yang beroperasi di seputaran Sidomakmur (i.e. Nimbro dan Jayanti), udang banana telah diekspor dalam skala besar.

Dari segi harga, udang banana pun memiliki harga jual paling tinggi. Rata-rata, harga jual udang dari Sidomkamur adalah 40-50 ribu rupiah per kg; harga tersebut naik sekitar 2 kali lipat dibandingkan tahun 2004 misalnya, dimana saat itu harga udang masih sekitaran 25-27 ribu rupiah per kg. Sejak tahun 2019, ada pembedaan harga jual udang berdasar ukuran; selain harga jual udang ukuran biasa yang berkisar 40-50 ribu rupiah per kg, harga udang yang berukuran kecil saat ini dipatok lebih rendah yaitu sekitar 24 ribu rupiah per kg.

Dari segi penangkapan udang, masyarakat saat ini lebih banyak menggunakan jaring, yang sering disebut dalam istilah lokal sebagai jaring gondrong/dobel/angkel. Dulunya, masyarakat mengikuti cara perusahaan untuk menangkap udang menggunakan jaring troll. Sejak sekitar tahun 2010, masyarakat mulai mengurangi penggunaan jaring troll seiring masuknya perusahaan udang Timika Samudera dan Jayanti. Saat ini, menurut masyarakat, penggunaan jaring troll sudah sepenuhnya dilarang oleh pemerintah. Untuk melaut sendiri, masyarakat rata-rata menggunakan perahu dari cicilan kredit bank; sebagian menggunakan bank BRI dan lainnya Bank Papua. Sementara itu, di Sidomakmur bapak-bapak lah yang lebih aktif melaut untuk menangkap udang. Ibu-ibu lebih banyak berperan di proses pasca penangkapan untuk membuka udang. Dibanding udang, peran ibu-ibu lebih banyak di proses pencarian ikan maupun kepiting.

Berdasar diskusi kelompok bersama masyarakat, ditemukan cukup banyak tantangan serta peluang yang mempengaruhi penghidupan masyarakat berbasis udang. Pertama, dari segi pengelolaan dan pemanfaatan udang, sejauh ini tidak ada penerapan kebijakan sasi untuk udang di Sidomakmur. Juga, tidak ada larangan berbasis konservasi yang diterapkan untuk mengambil udang berukuran kecil atau mengandung telur. Selain itu, belum ada penerapan budidaya udang di kampung. Masyarakat melihat belum ada inisiatif dari dinas perikanan untuk turun ke kampung mengurus perihal budidaya tersebut. Lebih lanjut, menurut informasi dari masyarakat, pemerintah daerah mempermasalahkan lahan yang akan dapat dipakai untuk budidaya udang; hal ini sehubungan dengan pengelolaan wilayah berbasis hak ulayat. Kedua, dari segi lokasi dan jumlah penangkapan udang. Persepsi masyarakat melihat bahwa seiring makin banyaknya nelayan dari Sidomakmur dan kampung lainnya yang menangkap udang



dalam areal laut yang sama, areal tangkap nelayan Sidomakmur sendiri tidak bertambah besar dari waktu ke waktu. Hal ini ditengarai mempengaruhi besarnya tangkapan udang dari waktu ke waktu. Hal ini berlaku ketika dibandingkan dengan kondisi tahun 2004 misalnya, dimana sekali melaut rata-rata masyarakat dapat menangkap hingga 70-80 kg (bahkan sesekali bisa mencapai 200 kg); dimana besaran tangkapan tersebut dapat diperoleh dengan jaring ukuran sedang (20-40 pcs), dengan harga jaring saat itu masih sekitar 60 ribu rupiah. Sedangkan saat ini, persepsi masyarakat melihat bahwa untuk menangkap udang hingga 50 kg pun sudah terasa sangat sulit. Ditambah lagi untuk memperoleh udang dengan berat sebesar itu saat ini nelayan udang harus membawa jaring ukuran besar (hingga 80 pcs), dengan harga rata-rata sudah mencapai 500 ribu rupiah.

Terkait dengan jumlah tangkapan udang yang dirasakan menurun dari waktu ke waktu, masyarakat menilai ini dipengaruhi langsung oleh aktivitas pengeboran minyak oleh perusahaan migas LNG Tangguh di areal Teluk Bintuni. Dampak negatif adanya operasi kilang minyak tersebut terhadap jumlah tangkapan udang mulai dirasakan sejak sekitar tahun 2006, dimana perusahaan LNG Tangguh baru mulai beroperasi di lokasi tersebut tahun 2004. Masyarakat sebenarnya mengharapkan adanya kompensasi atas hal ini dari perusahaan, namun keluhan masyarakat kepada LNG Tangguh belum ditanggapi lebih lanjut (semisal dalam bentuk kunjungan lapangan atau forum komunikasi yang diinisiasi perusahaan). Terlepas dari itu, menurut penilaian masyarakat hal ini belum mempengaruhi ukuran tangkapan udang, karena hal ini bergantung pada lokasi pencarian saja.

Terkait harga jual udang, masyarakat berpersepsi bahwa fluktuasi harga udang saat ini mempengaruhi pendapatan mereka secara negatif. Harga jual udang per kg sempat mencapai 54 ribu rupiah, sebelum kemudian turun lagi jadi 50 ribu rupiah. Ditambah lagi, saat ini ada kebijakan harga jual dari pembeli berbasis ukuran, dimana harga udang per kg yang ukuran kecil dihargai sekitar setengahnya saja, i.e. 27 ribu rupiah. Kekhawatiran ini hadir terlepas dari perbedaan harga udang dari tahun ke tahun yang cenderung naik karena berbagai faktor, e.g. inflasi; sebagai referensi, harga jual udang setempat tahun 2004 adalah 25 ribu rupiah per kg.

Selain itu, sejauh ini menurut masyarakat tidak ada aturan dari pemerintah daerah yang menetapkan harga jual minimal atas udang.

Terkait dengan segi pemasaran, masyarakat melihat bahwa sejatinya akan lebih menguntungkan dari segi margin penjualan jika bisa menjual udang langsung ke Sorong, alih-alih menunggu pengepul datang ke kampung. Menurut masyarakat, harga jual udang di kota Sorong bisa mencapai 75-90 ribu rupiah per kg. Namun, ini terkendala masalah biaya operasional untuk transportasi membawa udang dari Sidomakmur ke Sorong.

Terakhir, ada peluang yang muncul sehubungan dengan pengelolaan komoditas udang. Ada wacana dari masyarakat, khususnya didorong oleh ibu-ibu setempat untuk mendorong diversifikasi pendapatan berbasis produk olahan limbah udang. Produk olahan dapat berupa pembuatan petis dari kepala udang, atau kerupuk udang yang dapat dibuat dari udang ende. Saat ini, masyarakat sudah belajar sendiri cara membuat kerupuk udang dan petis, dimana hasilnya sudah pernah disetor hingga ke Bintuni dan Raja Ampat. Harapan masyarakat adalah di tahun 2020, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah berjalan sehingga mendukung perencanaan dan pelaksanaan dari pembuatan produk olahan udang tersebut. Terlepas dari peluang ini, terdapat tantangan berupa pemodalan. Saat ini, dana kampung dominan digunakan untuk pembangunan fisik kampung dan kesehatan masyarakat. Persepsi masyarakat melihat perlunya bantuan pemerintah langsung terkait hal ini, karena dana kampung sudah dialokasikan untuk pembangunan fisik dan kelembagaan BUMDes.

#### *Ikan kakap putih*

Selain udang dan kepiting, masyarakat Sidomakmur juga mengandalkan tangkapan ikan kakap putih untuk penghidupan. Sering disebut juga sebagai kakap Cina, masyarakat memanfaatkan baik daging maupun gelembungnya. Namun, yang paling dianggap bermanfaat adalah gelembungnya, dikarenakan harga jualnya yang lebih tinggi. Konon, gelembung ini banyak digunakan untuk obat-obatan; dimana ia dikonsumsi dengan cara direbus lebih dulu sebelum dimakan.

Sebenarnya sejak periode tahun 1998-2004, ikan kakap putih sudah mulai dimanfaatkan masyarakat namun masih dalam skala kecil; selain masih bergantung sepenuhnya pada udang, juga karena harga jualnya yang rendah (i.e. di tahun 2004, ada di kisaran 2500 rupiah per kg). Untuk saat ini, harga jual kakap putih dari nelayan ke penadah rata-rata adalah 5000 rupiah per kg. Kemudian, rantai pasoknya sebagai berikut. Dari penadah kemudian dijual ke penampung seharga 10 ribu rupiah per kg; dan dari penampung dijual lagi sebesar kira-kira 15 ribu rupiah ke pembeli akhir (termasuk untuk ekspor).

Tidak ada musim tertentu yang jadi acuan masyarakat untuk menangkap ikan. Masyarakat menggunakan pengetahuan lokal berupa arus laut; dimana kondisi arus laut harus dianggap ada di ukuran yang ideal supaya bisa menangkap ikan. Arus yang terlalu kencang menyulitkan proses penangkapan, sementara arus yang terlalu lemah mengakibatkan kesulitan mencari posisi ikan untuk ditangkap. Umumnya, di bulan September-Oktober ikan kakap putih paling banyak didapat.

Terkait komoditas ini, tantangan yang dirasakan masyarakat saat ini putih adalah semakin sulitnya menangkap ikan kakap putih. Ditambah lagi ukurannya yang dari waktu ke waktu dirasa semakin kecil. "*....kalo dulu pak, kita dalam satu hari kerja nelayan pancing itu pasti dapat, satu atau dua ekor dapat. Sekarang, kadang 1 bulan itu belum tentu satu.*"

## Kampung Mugim-Nusa

### KARAKTER ETNOLOGIS

Kampung Mugim dan Nusa merupakan dua kampung yang letaknya bersebelahan. Kedua kampung ini berada di Distrik Metemani, Kabupaten Sorong Selatan. Terdapat 75 KK di Kampung Mugim dan 119 KK di Kampung Nusa. Mayoritas penduduk di kedua kampung ini memeluk agama Kristen Protestan. Pada tahun 1300, 3 suku asli di suatu wilayah Distrik Metemani pindah ke wilayah Kampung Mugim-Nusa. Ketiga suku tersebut adalah Bira, Aimasi, dan Kokona. Ketiga suku ini mendiami wilayah tersebut dipimpin oleh dua masa kepemimpinan Raja, yaitu Raja Taboyi dan Raja Tomunggu yang makamnya masih dilestarikan hingga saat ini. Ketika pemerintahan kerajaan berakhir, wilayah ini diambil alih oleh pemerintah dan berubah menjadi Kampung Mugim dan Nusa pada tahun 1970. Ketiga suku asal tersebut kemudian melahirkan lebih dari 40 marga. Berbeda dengan kampung lain yang menjadi lokasi penelitian ekspedisi ini, tidak ditemukan adanya gelar adat. Sistem pemerintahan adat yang secara formal bisa ditemukan di kampung lain, tidak ditemukan di kampung ini. Kampung ini menggunakan sistem pemerintahan administrasi desa dengan struktur pemerintahan desa formal.

Saat ini terdapat rencana pemekaran dua kampung tersebut karena populasi penduduk yang semakin meningkat. Kampung Mugim dimekarkan menjadi Kampung Mugim Induk yang arti secara harafiah adalah membentuk sebagai pusat kampung, Kampung Woma yang berarti suara, Kampung Toga artinya pertemuan, dan Kampung Baimus yang artinya hasil musyawarah. Sementara, Kampung Nusa dimekarkan menjadi Kampung Nusa Induk sebagai pusat kampung, Kampung Tumaikiki yang artinya beringin, Kampung Beri yang artinya raja, dan Kampung Romo yang artinya dusun.

## KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN BAKAU DAN NON-BAKAU

### Bakau

#### *Kepiting*

Dari ekosistem bakau, masyarakat mengandalkan tangkapan kepiting bakau sebagai moda penghidupan. Dari berbagai jenis kepiting bakau, yang dianggap paling menguntungkan untuk dijual oleh masyarakat adalah jenis “emecu”. Untuk kepiting jenis “emecu”, harga jualnya mencapai 20-40 ribu rupiah per kg untuk yang jenis kelamin jantan. Dalam sehari, rata-rata per orang bisa memperoleh tangkapan 5-10 kg; hal ini pada akhirnya juga bergantung pada kondisi alam serta inisiatif masing-masing orang.

Untuk mendapatkan kepiting, alat tangkap yang digunakan adalah semacam keranjang yang dibuat sendiri secara tradisional dengan menggunakan kayu. Masyarakat menggunakan daging ikan sebagai umpan pancing kepiting. Di areal bakau, biasanya kepiting dapat ditemukan berada di seputaran pohon bakau yang buahnya panjang dan berakar tinggi; dalam bahasa lokal, pohon bakau seperti ini disebut juga “yangboro”. Sementara itu, terkait batas kepemilikan wilayah penangkapan kepiting bakau, di kampung Mugim dan Nusa terdapat kebebasan bagi anggota masyarakat setempat untuk mencari kepiting bakau lintas wilayah adat. Tidak diperlukan izin khusus untuk hal ini.

Kepiting “emecu” sendiri biasanya dijual ke pembeli yang berada di ibukota kabupaten. Untuk memfasilitasi penjualan kepiting tersebut, ada dua cara pemasokan yang biasa dipakai. Pertama, penadah kepiting akan datang setiap rata-rata 3-4 hari sekali ke kampung, untuk kemudian membawa hasil tangkapan kepiting ke ibukota kabupaten. Kedua, ada orang di desa yang menjadi pengumpul tangkapan kepiting masyarakat, untuk kemudian membawa hasil tangkapan tersebut ke luar desa. Namun, cara terakhir ini secara umum lebih jarang dipraktekkan; hanya bila harga “emecu” dianggap mengalami kenaikan saja maka cara ini akan digunakan untuk memaksimalkan margin pendapatan hasil jual kepiting. Menurut masyarakat, pembeli di ibukota kabupaten didominasi orang dari suku Bugis.

Terdapat beberapa tantangan saat ini yang dilihat masyarakat kampung Mugim dan Nusa sebagai faktor yang mempengaruhi penghidupan berbasis kepiting bakau. Pertama, jangkauan harga jual kepiting yang tidak stabil, dimana harga ditentukan oleh dinamika pasar. Pada saat yang sama, belum ada kebijakan penetapan batas minimum harga jual kepiting yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Kedua, dari waktu ke waktu persepsi masyarakat melihat bahwa jumlah tangkapan kepiting bakau dalam sekali jalan dirasa semakin sedikit; meskipun ukuran kepiting secara umum dilihat cenderung sama: *“...itu dia: binatang itu (dia) juga berkembang biak. Jadi kalo kami tangkap dia terus, pasti dia habis.”*

Pada saat yang sama, sampai saat ini belum ada penerapan budidaya atas komoditas kepiting bakau. Seiring dengan itu, masyarakat melihat belum ada dukungan penerapan budidaya kepiting dari dinas pemerintah daerah. Terkait dengan itu, harapan masyarakat adalah ada fasilitasi dan pelatihan budidaya kepiting dari pemerintah, sehingga pada akhirnya bisa membantu meningkatkan hasil tangkapan masyarakat.

### *Non-kepiting*

Selain kepiting, masyarakat juga memanfaatkan kayu dari bakau. Pemanfaatan kayu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembangunan rumah dan kayu bakar. Kayu bakau yang biasanya digunakan masyarakat untuk membangun rumah sering disebut juga “tongke” dalam bahasa lokal.

Selain kayu, masyarakat juga secara terbatas memanfaatkan udang bakau, yang dalam bahasa lokal disebut “ototo”. Sejauh ini, pemanfaatan sebatas untuk dipancing dan dimakan sendiri. Biasanya, di kampung ibu-ibu lah yang memancing “ototo”.

Terkait dengan pepohonan bakau, menurut informasi dari masyarakat, sekitar tahun 2016 dinas pemerintah daerah pernah mengunjungi lokasi kampung untuk memfasilitasi penanaman ulang bakau. Bantuan yang diberikan berupa bibit pohon bakau sebanyak kira-kira 600 buah. Namun, menurut masyarakat, pohon bakau yang ditanam tersebut seluruhnya mati. Indikasinya adalah

dipengaruhi oleh fenomena pengikisan / abrasi. Pengikisan ini juga dianggap masyarakat mempengaruhi kondisi mangrove secara umum di desa.

### **Non-Bakau**

#### *Kebun sayur & buah*

Pertama, adalah dari sektor perkebunan sayur dan buah. Yang ditanam oleh masyarakat antara lain meliputi pisang serta sayur-sayuran. Namun, hal ini bersifat skala kecil saja, dimana hasil panen hanya untuk dimakan sendiri.

#### *Sawit & sagu*

Yang kedua, sebagian masyarakat dari kedua kampung juga berprofesi sebagai pekerja di perusahaan sawit (PT. ANJ) dan juga perusahaan sagu. Areal kerja kedua perusahaan tersebut terletak di Distrik Matemani, seperti juga halnya kampung Mugim dan Nusa. Menurut masyarakat, perusahaan sawit ANJ mulai beroperasi di distrik sejak tahun 2014; sedangkan perusahaan sagu beroperasi sejak 2010. Terkait perusahaan sagu, hanya sekitar 3 orang dari kampung Mugim dan Nusa yang bekerja di perusahaan tersebut. Sementara itu, sekitar lebih dari 60 orang dari kedua kampung yang bekerja di perusahaan sawit ANJ.

Masyarakat kampung yang menjadi karyawan ANJ juga diberi modal bibit sawit oleh perusahaan tersebut. Sehingga, mereka dapat menanam sawit sendiri dalam skala kecil untuk meningkatkan pendapatan. Penanaman sawit secara individual dengan fasilitasi ANJ tersebut telah dimulai kira-kira sejak awal ANJ masuk ke distrik Matemani (i.e tahun 2014). Saat wawancara dilakukan, beberapa anggota masyarakat mengaku sudah mulai panen sawit.

#### *Kerajinan tangan*

Yang ketiga, sebagian ibu-ibu di kampung juga membuat produk kerajinan tangan untuk menambah penghasilan, utamanya noken. Dari hasil wawancara, sejauh ini noken yang dibuat hanya dijual di skala lokal desa, termasuk bisa dijual ke orang dari luar desa yang datang ke kampung. Di tahun 2017 lalu, pernah ada pelatihan yang difasilitasi pemerintah daerah untuk

ibu-ibu setempat; dalam lingkup kegiatan PKK kampung. Pelatihan tersebut antara lain meliputi pembuatan taplak meja dari rajutan kain. Namun, menurut masyarakat yang diwawancara, mereka mengaku masih kesulitan membuat produk kerajinan tangan hasil pelatihan dengan kualitas yang baik.

### **KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN PERIKANAN**

#### *Udang*

Komoditas yang diandalkan masyarakat kampung Mugim dan Nusa sebagai sumber penghidupan adalah udang. Dari berbagai jenis udang, udang yang dimanfaatkan masyarakat adalah udang laut, yang dalam bahasa lokal disebut “ekaito”. Selain “ekaito”, juga terdapat jenis udang lain yaitu udang sungai (“meraho”); namun, udang “meraho” tidak dimanfaatkan masyarakat.

Jumlah udang “ekaito” yang dapat ditangkap dalam sekali jalan biasanya bergantung pada musim tangkapan. Di musim yang bagus (i.e. Desember-Januari), dalam sekali jalan masyarakat secara keseluruhan bisa memperoleh hingga lebih dari 100 kg udang. Di luar musim tersebut, rata-rata tangkapan hanya mencapai maksimal 50 kg.

Sedangkan terkait harga jualnya, harga jual udang “ekaito” bervariasi sesuai dengan bentuk udang. Untuk udang tanpa kepala, harga jualnya rata-rata 60 ribu rupiah per kg, Untuk udang dengan kepala, harga jualnya rata-rata 50 ribu rupiah per kg. Dari segi rantai pasoknya, nelayan udang di kampung menjual ke toko “pialang” yang ada di kota Sorong melalui penadah dari ibukota kabupaten yang akan datang ke desa. Selain itu, juga terdapat 1 orang pengumpul hasil tangkapan udang di desa; dimana sebagai alternatif moda rantai pasok di atas, pengumpul tersebut juga dapat membawa hasil tangkapan udang masyarakat kampung langsung ke Sorong. Sehubungan dengan batas wilayah setempat yang berbasis petuanan adat, informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa di kampung Mugim dan Nusa terdapat kebebasan bagi anggota masyarakat setempat untuk mencari udang lintas wilayah adat. Tidak diperlukan izin khusus untuk hal ini; artinya siapapun nelayan setempat yang punya sumber daya operasional (e.g. bahan bakar minyak, transportasi) yang memadai dapat melakukannya. Namun demikian,



terdapat pembatasan bagi nelayan luar desa atau masyarakat pendatang yang bukan orang asli Papua (OAP). Hal ini tidak hanya terkait dengan hak ulayat orang asli; tapi juga untuk mengantisipasi disparitas perolehan hasil tangkapan, yang dapat dipicu kepemilikan fasilitas penangkapan udang yang lebih baik oleh nelayan pendatang. Meski demikian, kebijakan setempat memungkinkan orang luar desa untuk menjadi penadah hasil tangkapan udang masyarakat lokal kampung Mugim dan Nusa. Aturan pembatasan ini sudah diberlakukan oleh masyarakat selama beberapa waktu, khususnya sejak adanya konflik mata pencaharian dengan pendatang dari Buton, Sulawesi Tenggara.

Terlepas dari aspek pengelolaan yang dijelaskan di atas, terdapat berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi proses pengelolaan udang di kampung Mugim dan Nusa. Penjelasannya sebagai berikut: Pertama, persepsi masyarakat melihat bahwa dari waktu ke waktu, masyarakat merasakan semakin sulitnya menangkap udang laut. Hal ini mulai dirasakan para nelayan udang sejak 2010. Selain itu, masyarakat menyebutkan bahwa lokasi penangkapan udang yang biasa digunakan masyarakat kampung Mugim dan Nusa sebenarnya tidak dimiliki secara eksklusif, tapi juga menjadi areal penangkapan udang masyarakat kampung lain yang lokasinya berdekatan. Bagi masyarakat Mugim dan Nusa, implikasi hal-hal ini adalah: dari waktu ke waktu, kebutuhan penggunaan jaring oleh nelayan semakin besar demi bisa mendapat hasil tangkapan udang yang banyak seperti di masa lalu. Kesulitan menangkap udang ini diikuti dengan kondisi belum adanya penerapan budidaya udang di kampung Mugim dan Nusa; termasuk juga belum adanya fasilitasi budidaya dari dinas. Terkait hal ini, masyarakat kampung mengharapkan adanya pelatihan dan dukungan budidaya udang dari pemerintah daerah. Kedua, terdapat peluang untuk menerapkan sasi udang di kampung. Hal ini telah dimulai sejak tahun 2018 dengan adanya sosialisasi penerapan sasi udang (dan juga kepiting) oleh organisasi World Wildlife Fund (WWF). Namun, sosialisasi tersebut belum mencapai tingkat penentuan dan implementasi zona inti konservasi. Sampai saat ini, masyarakat mengaku masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait, supaya bisa menentukan lokasi mana persisnya yang perlu di-sasi. Terakhir, ada peluang pemberian kredit pemodalan untuk kegiatan berbasis perikanan di kampung. Hal ini berdasarkan kunjungan ke kampung oleh dinas perikanan daerah yang

dilakukan tahun 2019 lalu. Menurut masyarakat, rencananya dinas perikanan tersebut akan memberikan fasilitasi sistem kredit untuk nelayan setempat. Namun, saat penggalan data dilakukan, belum diketahui persis apa bentuk kegiatan yang akan difasilitasi oleh sistem kredit tersebut.

## Kampung Wailebet

### KARAKTER ETNOLOGIS

Kampung Wailebet terletak di Distrik Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Masyarakat Kampung Wailebet yang berada di Pulau Batanta biasa juga disebut orang bata. Secara harafiah dalam Bahasa Biak, Wai memiliki arti air dan Lebet memiliki makna pohon kayu. Sementara dalam Bahasa Batanta, salah satu bahasa lokal di distrik Batanta, artinya pinggang belakang. Mayoritas penduduk Kampung Wailebet beragama Kristen. Adapun agama Islam hadir melalui perkawinan campur dengan orang dari luar pulau dan migrasi masyarakat dari Jawa, Bugis, Tanimbar, dll.

Nenek moyang masyarakat Wailebet, pada masa kerajaan, tidak menetap pada satu lokasi untuk bermukim. Kampung pertama tempat nenek moyang mereka bermukim berdekatan dengan Tanjung Empaukait. Kemudian berpindah ke Kampung Munyuh. Pada tahun 1917, nenek moyang masyarakat Wailebet yang bernama Sumaila berinisiatif untuk membangun kampung Wailebet di lokasi yang sampai sekarang ditinggali.

Secara kultural, pulau Batanta terbagi menjadi dua bagian. Sebelah barat merupakan kekuasaan Kapitan Laut, sementara sebelah timur merupakan kekuasaan Sangaji. Pembagian wilayah kekuasaan secara kultural ini sudah terjadi secara turun temurun sehingga melahirkan dua kampung yang saling bersebelahan, yaitu Wailebet (Sangaji) dan Yenanas (Kapitan Laut). Masing-masing dengan wilayah adatnya atau wilayah petuanannya sendiri-sendiri, tapi tetap hidup secara kekeluargaan, seperti yang dikatakan seorang informan: “Tapi hidup secara kebersamaan, secara kekeluargaan kita hidup secara bersama. Makan pun begitu artinya kita makan bisa mencari kesana, mereka juga bisa mencari kesini. Jadi keutuhan di dalam dua kubu ini ada. Jadi kita tidak pecah berdasarkan batas wilayah itu tidak. Kalau kehidupan kekeluargaan yang kita saling jalin.” Masyarakat kampung Wailebet sempat beberapa kali berpindah pemukiman. Tercatat pada tahun 1972, masyarakat Kampung Wailebet berpindah ke kampung Yenanas mengikuti anjuran pemerintah daerah karena jumlah penduduk yang sedikit. Pada tahun 2000, mereka kembali ke lokasi Kampung Wailebet hingga saat ini.

## KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN BAKAU DAN NON-BAKAU

### Bakau

Dari ekosistem bakau, pemanfaatan oleh masyarakat setempat meliputi komoditas kayu, siput dan kepiting. Namun secara keseluruhan, pemanfaatan komoditas-komoditas tersebut bersifat terbatas.

Untuk kayu, saat ini masyarakat menggunakan kayu bakau untuk kebutuhan kayu bakar. Untuk kebutuhan ini, kayu yang dipakai lebih banyak adalah kayu bakau yang sudah kering atau rubuh. Sedangkan untuk pembangunan rumah, penggunaan kayu bakau sudah jarang karena masyarakat lebih banyak menggunakan seng. Hal ini berbeda dengan kebiasaan masyarakat setempat zaman dulu, dimana kayu bakau digunakan membuat rumah.

Terkait siput, ada beberapa jenis siput yang biasa dikonsumsi masyarakat, seperti misalnya bia kodok dan bia boi. Siput-siput ini biasanya hanya untuk dimakan sendiri oleh masyarakat; dan hanya dijual bila ada kebutuhan khusus. Terakhir, untuk kepiting, masyarakat juga mengambil kepiting di mangrove namun sifatnya masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan masyarakat masih mengandalkan hasil laut seperti udang sebagai mata pencaharian utama.

Sementara terkait pariwisata, kampung Wailebet dalam lingkup Pulau Batanta memiliki potensi wisata alam berupa *blue water mangrove*. *Blue water mangrove* merupakan ekosistem bakau yang berada di lingkungan air yang berwarna jernih kebiruan, dimana areal pepohonan bakau di dalamnya terletak berdampingan dengan terumbu karang yang dapat dilihat jelas dari permukaan laut. Menurut pengamatan masyarakat, beberapa kali wisatawan pernah datang mengunjungi kampung Wailebet dalam rangka wisata mangrove. Namun, secara umum kegiatan mereka terfokus pada mobilitas eksplorasi mangrove, serta juga di lokasi penginapan yang letaknya bukan di areal kampung Wailebet. Dengan demikian, aktivitas wisata ini belum memberikan dampak pendapatan yang signifikan bagi masyarakat Wailebet.

Terkait wisata, harapan masyarakat adalah ada aktivitas pariwisata yang dikembangkan dan difasilitasi oleh dinas pariwisata; sehingga memberikan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat kampung.

**Non-Bakau***Perkebunan*

Selain hasil laut, masyarakat Wailebet juga mengandalkan komoditas perkebunan sebagai alternatif penghidupan. Aktivitas perkebunan khususnya berlangsung intensif selama periode angin laut besar di areal laut kampung; khususnya ketika pertengahan tahun.

Komoditas pekebunan yang menjadi andalan khususnya adalah pisang dan kakao. Untuk pisang, rata-rata dapat dijual per tandan seharga 40-50 ribu rupiah. Sedangkan kakao rata-rata dijual 15-20 ribu rupiah per kg. Di Wailebet, komoditas pisang sendiri sudah ada sejak zaman dulu. Sedangkan perkebunan kakao pertama-tama berasal dari bibit kakao yang didatangkan dari Jember, Jawa Timur dan difasilitasi Dinas Perkebunan. Setelah bantuan bibit tersebut, masyarakat mengembangkan perkebunan kakao sehingga kemudian dapat memproduksi bibit kakao sendiri. Saat ini, rata-rata tiap KK punya perkebunan kakao. Rata-rata, satu KK bisa memiliki paling tidak 500-1000 pohon kakao. Satu pohon bisa menghasilkan rata-rata 5-10 kg kakao; kecuali untuk pohon yang buahnya berukuran kecil maka rata-rata kakao yang dihasilkan sebesar 1 kg.

Selain pisang dan kakao, juga terdapat beberapa komoditas lain seperti sayur-sayuran, merica, jagung, sagu, kelapa, durian, dan rambutan. Sayur dan buah ini sebagian dimakan sendiri dan sebagian dijual. Sayur dan buah tersebut, termasuk pisang dan kakao, akan dijual ke kota Sorong. Unit penjualan tersebut berbeda-beda; pisang dijual per tandan, merica dijual per kg, sedangkan sayur biasanya dijual per ikat.

Areal perkebunan masyarakat umumnya berasal dari pembukaan hutan alam setempat. Sejauh ini, tidak ada kebijakan lokal, e.g. sasi, yang diterapkan untuk pembatasan pembukaan hutan maupun pengambilan kayu hutan di kampung. Alasannya diwakili oleh kutipan perwakilan masyarakat berikut: *"Hutan ini memang perlu dilindungi, tapi kami juga butuh untuk kami tinggal. Dalam arti: yang biasa kami lakukan itu berkebun; tapi kalau berkebun pun dilarang, ya (pasti) kami mau gimana..."*

*Kerajinan*

Terakhir, salah satu alternatif penghidupan di Wailebet adalah kerajinan tangan. Kerajinan didominasi oleh ibu-ibu di kampung. Beberapa produk kerajinan yang dibuat antara lain topi dari daun tikar, serta noken yang biasa dibuat dari kulit kayu. Biasanya noken tersebut dapat diisi barang-barang berukuran kecil, semisal tasbih. Produk kerajinan tersebut biasanya dijual dalam skala lokal (i.e. di kampung sendiri) maupun juga dijual hingga ke kota Sorong.

### **KARAKTER PEMANFAATAN & PENGELOLAAN PERIKANAN**

Masyarakat Wailebet mengandalkan hasil laut sebagai mata pencaharian utama. Hasil laut yang dimaksud meliputi ikan laut (bara, tenggiri, kakap) dan udang. Hasil laut tersebut dijual ke pembeli yang berbasis di Sorong. Untuk itu, ada dua cara pemasokan. Pertama, pembeli dari Sorong datang ke kampung untuk membeli hasil laut. Kedua, ada pengumpul dari kampung yang akan mengumpulkan hasil tangkapan masyarakat untuk kemudian dibawa ke Sorong. Cara kedua ini dirasa perlu karena frekuensi kedatangan pembeli dari Sorong ke kampung cenderung tidak menentu.

Terkait harga jual komoditas, untuk ikan sendiri harga ikan pasar bisa mencapai 10 ribu rupiah per kg. Ikan tangkapan yang paling mahal harganya adalah ikan kakap merah, yang harga jualnya mencapai rata-rata 50 ribu rupiah per kg. Sedangkan untuk udang, harga jual dibagi berdasar jenis udang. Untuk udang Mutiara, bisa dijual hingga mencapai 500 ribu rupiah per kg. Sementara, udang bamboo dijual dengan harga rata-rata 250 ribu rupiah per kg. Harga jual yang tinggi untuk udang menyebabkan komoditas udang menjadi komoditas yang paling diandalkan masyarakat sebagai ladang pencaharian.

Terkait moda pengelolaan dan penangkapan ikan dan udang, penjelasannya sebagai berikut. Meskipun lebih banyak didominasi bapak-bapak, seringkali ibu-ibu dan anak-anak di kampung pun bisa ikut memancing ikan dan udang; untuk kemudian dijual. Umumnya, di periode bulan Mei-Juni masyarakat tidak melaut dikarenakan adanya angin kencang (i.e. angin selatan); sebagai gantinya, masyarakat bertani sayur dan buah. Sedangkan di bulan-bulan lainnya masyarakat bebas melaut.

Untuk menangkap ikan/udang, masyarakat lebih banyak menggunakan alat pancing berupa jaring ukuran kecil, atau menyelam. Menurut masyarakat, jaring ukuran besar sudah dilarang penggunaannya. Setelah ikan/udang ditangkap, kemudian diawetkan dengan menggunakan es yang dibeli dari Sorong.

Lebih lanjut, masyarakat menerapkan peraturan bahwa orang dari luar kampung bisa mencari hasil laut di areal tangkapan masyarakat Wailebet dengan kewajiban izin sebelum menjalankan aktivitas pencarian. Izin tersebut biasanya berupa pemberian sejumlah uang pada perwakilan masyarakat Wailebet. Jumlah uang yang dibayar tersebut akan disepakati bersama masyarakat Wailebet. Jika tidak berizin, maka kampung Wailebet dapat menerapkan sanksi adat berupa denda uang yang bisa mencapai 30 juta rupiah.

Sementara itu, juga terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi pemanfaatan hasil laut oleh masyarakat Wailebet. Penjelasan sebagai berikut. Pada saat diskusi kelompok dilakukan bersama masyarakat, persepsi masyarakat melihat bahwa jumlah tangkapan ikan dan udang dari waktu ke waktu semakin sedikit. Menurut masyarakat, hal ini antara lain disebabkan adanya alat modern yang pernah digunakan seperti potassium dan bom ikan. Lebih lanjut, masyarakat melihat pentingnya budidaya untuk dilakukan, khususnya budidaya udang mengingat udang adalah sumber mata pencaharian utama masyarakat. Sampai saat ini, implementasi budidaya udang dan ikan belum dilakukan di Wailebet.

Informasi yang didapat dari masyarakat menyebutkan bahwa areal Pulau Batanta (termasuk di dalamnya adalah lokasi kampung Wailebet) sudah termasuk ke dalam Daerah Perlindungan Laut (DPL); dimana di dalamnya ada pembagian zona seperti misalnya zona inti, yang difasilitasi oleh organisasi Conservation International (CI). Masih terkait isu konservasi, menurut masyarakat dinas perikanan dan kelautan pernah beberapa kali mengunjungi desa Wailebet untuk memberikan sosialisasi pelestarian ekosistem laut, yaitu supaya masyarakat membatasi pengambilan hasil laut sesuai kebutuhan. Selain itu, organisasi The Nature Conservancy (TNC) dan World Wildlife Fund (WWF) juga pernah mengunjungi kampung Wailebet untuk sosialisasi konservasi laut.

Terlepas dari hal tersebut, sejauh ini masyarakat belum pernah menerapkan kebijakan berbasis konservasi berupa sasi untuk komoditas laut. Dari hasil diskusi bersama masyarakat, persepsi masyarakat melihat bahwa meskipun sudah ada kesadaran akan manfaat dari sasi laut, belum ada urgensi kuat untuk menerapkannya. Lebih lanjut, masyarakat melihat penerapan sasi berpotensi mempengaruhi secara negatif produktivitas nelayan serta pendapatan masyarakat dari hasil menjual tangkapan laut ke pembeli.



## Lampiran

### PEDOMAN WAWANCARA

Kegiatan: Ekspedisi Mangrove 2019

Tanggal: Desember 2019

Aspek		Pertanyaan
Sistem pengelolaan	Pihak yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siapa orang atau lembaga yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas pemanfaatan SDA di desa ini?</li> <li>Mohon juga mendeskripsikan peran mereka, alasan aktivitas itu dilakukan, kapan itu dilakukan, dan bagaimana itu dilakukan?</li> </ul>
	Praktek sesuai konteks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada waktu-waktu khusus bagi masyarakat desa dan pihak lain yang terlibat untuk memanfaatkan sumber daya tersebut?</li> </ul>
	Tingkat panen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana frekuensi dan kuantitas panen pada masing-masing waktu?</li> </ul>
	Metode untuk penggunaan sumber daya berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk apa masyarakat menggunakan sumber daya tersebut? Outputnya?</li> </ul>
	Teknologi yang tepat dan efektif untuk digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana masyarakat memanen dan mengolah sumber daya tersebut? Alat apa saja yang digunakan?</li> </ul>
	Metode untuk beradaptasi dengan perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika terjadi perubahan (misalnya penurunan populasi, etc), apa yang dilakukan oleh masyarakat?</li> </ul>
Etnologi desa	Karakter populasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana karakter populasi di desa ini berdasarkan misalnya, suku dan agama</li> </ul>

	Struktur adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana bentuk struktur adat di desa ini?</li> <li>• Apa peran atau fungsi dari masing-masing pihak di dalam struktur adat?</li> <li>• Apakah ada perubahan dari waktu ke waktu?</li> </ul>
Pengetahuan tentang penggunaan lingkungan di masa lalu dan saat ini	Pola penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah lahan sumber daya tersebut sedari dulu digunakan untuk pemanfaatan sumber daya?</li> <li>• Apakah terdapat perubahan dalam penggunaan lahan pemanfaatan sumber daya?</li> <li>• Apakah menurut Anda penebangan hutan di desa Anda adalah sebuah hal yang buruk? Kenapa?</li> <li>• Apakah orang-orang di desa merasakan bahwa penebangan hutan di desa Anda adalah hal yang buruk? Kenapa?</li> <li>• Siapa orang atau lembaga yang menurut Anda berkontribusi pada penebangan hutan dan degradasi hutan setempat?</li> </ul>
	Sejarah kelompok budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pola kepemilikan lahan yang digunakan untuk pemanfaat sumber daya tersebut</li> <li>• Bagaimana dengan pola-pola migrasi dan sistem kekerabatan mempengaruhi kepemilikan lahan?</li> </ul>
Etika dan nilai-nilai	Sikap yang benar untuk dilakukan dalam suatu <i>setting</i> lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada nilai-nilai atau aturan adat yang mengatur system pengelolaan dan pemanfaat sumber daya alam? Atau mengatur system kepemilikan sumber daya alam?</li> </ul>
Kosmologi	Asumsi spiritual tentang cara kerja sesuatu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada keterkaitan antara kepercayaan lokal terhadap lingkungan di mana sumber daya yang dimanfaatkan masyarakat berada? (missal taboo, mitos, legenda, sanksi adat, etc).</li> </ul>
Faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi praktek tradisional		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut pengalaman anda, dari hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya, apakah faktor-faktor eksternal (contoh: konflik lahan, infrastruktur: pembangunan infrastruktur di dalam/ perbatasan desa, stabilitas keamanan dan politik, dukungan pemerintahan lokal terkait pengelolaan hutan, keadaan ekonomi di luar desa (kabupaten, kecamatan), perubahan iklim / cuaca, pertumbuhan penduduk, pendanaan untuk mendukung kondisi hutan, pariwisata, perkembangan industri) turut berperan serta dalam mengubah</li> </ul>

	<p>praktek-praktek tradisional pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam? Jelaskan berdasarkan pengamatan anda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se jauh apa hal tersebut Anda lihat penting dalam mempengaruhi perubahan kondisi hutan di desa?</li><li>• Apakah Anda merasa hal tersebut terus berubah-ubah dari waktu ke waktu, alias cenderung tidak stabil?</li></ul>
--	--